

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**EVALUASI TUGAS DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN INDRAGIRI HULU DALAM PENGANGKUTAN
SAMPAH DI PASAR KOTA RENGAT**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

OLEH :

**Syukurianto
NPM : 157310178**

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

PEKANBARU TAHUN

2021

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN PEMBIMBING

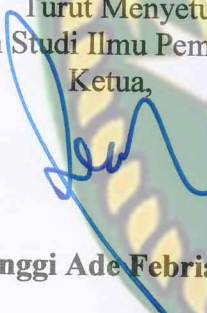
Nama : Syukurianto
NPM : 157310178
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S. 1)
Judul Skripsi : Evaluasi Tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Indragiri Hulu Dalam Pengangkutan Sampah Di Pasar
Kota Rengat.

Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi dalam Skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diujikan.

Pekanbaru, 29 Maret 2021

Turut Menyetujui :
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua,

Pembimbing


Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si.


Nina Yusraini, S.IP., M.Si.

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

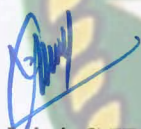
PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Syukurianto
NPM : 157310178
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S. 1)
Judul Skripsi : Evaluasi Tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Pengangkutan Sampah Di Pasar Kota Rengat.

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relative telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Konferehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimannya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 16 Juli 2021

Ketua,



Nina Yustaini, S.IP., M.Si.

Sekretaris,



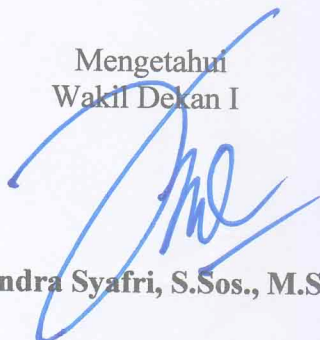
Data Wardana. S.Sos., M.IP.

Anggota.



Dra. Hj. Monalisa, M.Si.

Mengetahui
Wakil Dekan I



Indra Syafri, S.Sos., M.Si.

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

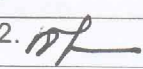
=====

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 147 /UIR-Fs/Kpts/2021 tanggal 14 Juni 2021 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 15 Juni 2021 jam 13.00 – 14.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Syukurianto
NPM : 157310178
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **Evaluasi tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu dalam Pengangkutan Sampah di Pasar Kota Rengat.**

Nilai Ujian : Angka : " 81 " ; Huruf : " A - "
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Nina Yuslaini, S.IP, M.Si	Ketua	1. 
2.	Data Wardana, S.Sos, M.IP	Sekretaris	2. 
3.	Dra. Hj. Monalisa, M.Si	Anggota	3. 
4.	Irwan Gesmi, S.Sos, M.Si	Notulen	4. 

Pekanbaru, 15 Juli 2021
An. Dekan,


Indra Safri, S.Sos., M.Si.
Wakil Dekan I Bid. Akademik

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 1147/UIR-FS/KPTS/2021
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

Memperhatikan : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Syukurianto
N P M : 157310178
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **Evaluasi Tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu dalam Pengangkutan Sampah di Pasar Kota Rengat.**

Struktur Tim :

1. Nina Yuslaini, S.IP, M.Si	Sebagai Ketua merangkap Penguji
2. Data Wardana, S.Sos., M.IP	Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
3. Dra. Hj. Monalisa, M.Si	Sebagai Anggota merangkap Penguji
4. Irwan Gesmi, S.Sos., M.Si.	Sebagai Notulen

2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.

3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 14 Juli 2021
Dekan,

Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si.

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi.....
4. Arsip -----sk.penguji-----

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Syukurianto
NPM : 157310178
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S. 1)
Judul Skripsi : Evaluasi Tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Pengangkutan Sampah Di Pasar Kota Rengat.

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim penguji dan nilai telah memenuhi persyaratan administrasi dan akademis, oleh karena itu dapat disyahkan sebagai karya ilmiah.

Pekanbaru, 04 Agustus 2021
An. Tim Penguji

Ketua


Nina Yusraini, S.IP., M.Si.

Sekretaris

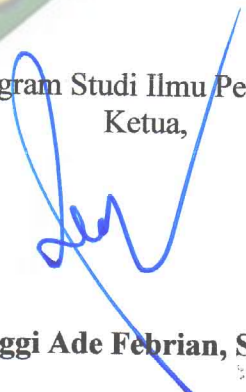

Data Wardana. S.Sos., M.IP.

Turut Menyetujui

Wakil Dekan I


Indra Syafri, S.Sos., M.Si.

Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua,


Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan segala keterbatasan akhirnya karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk Skripsi dapat penulis selesaikan. Skripsi yang berjudul “Evaluasi Tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Pengangkutan Sampah Di Pasar Kota Rengat.” ini penulis tulis dan diajukan ke fakultas dalam rangka memenuhi salah satu syarat menamatkan studi dan sekaligus memperoleh gelar sarjana strata satu pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembaran bab perbab Skripsi ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah Skripsi ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca.

Penulis menyadari pula bahwa dalam proses studi maupun dalam proses penulisan dan penyelesaian Skripsi ini banyak pihak turut membantu. Sehubungan dengan itu secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan salud dan terimakasih kepada :

1. Rektor Universitas Islam Bapak Riau Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.CL. yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimbah ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Bapak Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada fakultas Ilmu Sosial dan Politik Ilmu Pemerintahan.
3. Ketua Program Studi Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si. selaku yang telah memfasilitasi dan ilmu pengetahuan sehingga telah memperluas wawasan dan sangat membantu penulis dalam melakukan penelitian ini.
4. Ibu Nina Yuslimi, S.IP., M.Si. selaku dosen Pembimbing yang telah menyediakan waktu dan membentuk ilmu pengetahuan kepada penulis terutama selama proses bimbingan berlangsung.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan Ilmu Pengetahuan selama penulis menimba Ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
6. Karyawan, Pegawai dan Tata Usaha yang selalu mengarahkan penulis dalam melengkapi kelengkapan prosedur melakukan penelitian.
7. Orang tua, yang telah memberikan semangat dan motivasi penulis agar penulis dapat menyelesaikan penelitian.
8. Rekan-rekan seperjuangan Ilmu Pemerintahan angkatan 2015 yang telah membantu dan memberikan semangat agar penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

Penulis bermohon kepada Yang Maha Kuasa semoga jasa baik beliau itu dibalas dengan rahmat dan karunia yang setimpal, amin

Akhirnya penulis berharap semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat yang cukup berarti kepada setiap para pembacanya.

Pekanbaru, 04 Agustus 2021
Ttd,

Syukurianto



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
BERITA ACARA UJIAN KONFEREHENSIF	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRAC.....	xvii
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
1. Tujuan Penelitian.....	10
2. Kegunaan Penelitian.....	10
 BAB II : KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	
A. Kajian Pustaka	11
1. Konsep Pemerintahan.....	11
2. Konsep Tugas	15
3. Asas Dekonsentrasi dan Asas Tugas Pembantuan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan.....	17
4. Konsep Pelimpahan Kewenangan	25
5. Konsep kebijakan	27
6. Konsep Evaluasi	31
7. Konsep Pengawasan	34

8. Konsep Pengelolaan	37
B. Penelitian Terdahulu	41
C. Kerangka Pikiran	42
D. Konsep Operasional	43
E. Operasional Variabel.....	45

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian.....	46
B. Lokasi Penelitian	46
C. Informan dan Key Informan.....	47
D. Teknik Penarikan Informan.....	48
E. Jenis dan Sumber Data	48
F. Teknik Pengumpulan Data	49
G. Teknik Analisis Data.....	49
H. Jadwal Pelaksanaan Penelitian.....	50

BAB IV : DISKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Indragiri Hulu	51
B. Visi dan Misi Kabupaten Indragiri Hulu.....	52
C. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu.....	54

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden	57
1. Identitas Responden	57
2. Usia Responden	57
3. Pendidikan Informan.....	59
B. Evaluasi Tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Pengangkutan Sampah Di Pasar Kota Rengat.....	60
1. Efektivitas	62
2. Efisiensi.....	67
3. Kecukupan	71
4. Perataan.....	75

5. Responsivitas	78
6. Ketepatan	82
C. Hambatan Evaluasi Tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Pengangkutan Sampah Di Pasar Kota Rengat..	86
BAB VI : PENUTUP	
A. Kesimpulan	89
B. Saran	90
DAFTAR KEPUSTAKAAN	92
DAFTAR LAMPIRAN	95



DAFTAR TABEL

Tabel :	Halaman
I.1 Jumlah Pasar Di Kecamatan Rengat.....	7
I.2 Sarana Operasional Angkutan Sampah.....	8
I.3 Jumlah Petugas Lapangan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu.....	8
II.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Ini Dengan Penelitian Terdahulu.	41
II.2 Operasional Variabel penelitian tentang Evaluasi Tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Pengangkutan Sampah Di Pasar Kota Rengat.....	45
III.1 Jumlah Informan	48
III.2 Jadwal Pelaksanaan Penelitian.....	51
V.1 Identitas Informan Berdasarkan Jenis Kelamin.	58
V.2 Identitas Informan Berdasarkan Umur.....	59
V.3 Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar :	Halaman
II. 1 : Kerangka pikiran tentang Evaluasi Tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Pengangkutan Sampah Di Pasar Kota Rengat	43
IV. 1 : Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu.....	54



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran :	Halaman
1. Daftar Wawancara Penelitian Tentang Evaluasi Tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Pengangkutan Sampah Di Pasar Kota Rengat	95
2. Foto-Foto Dokumentasi Hasil Penelitian Observasi Tentang Evaluasi Tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Pengangkutan Sampah Di Pasar Kota Rengat.....	98
3. Surat Keputusan Dekan Fisipol Uir	106



SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Peserta Ujian Skripsi Yang Bertanda Tangan Di Bawah ini :

Nama : Syukurianto
NPM : 157310178
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S. 1)
Judul Skripsi : Evaluasi Tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Pengangkutan Sampah Di Pasar Kota Rengat.

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian Skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dengan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa keseluruhan persyaratan administrasi, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas dan universitas.
3. Bahwa apabila di kemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan diatas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian komprehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 04 Agustus 2021



Syukurianto

EVALUASI TUGAS DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN INDRAGIRI HULU DALAM PENGANGKUTAN SAMPAH DI PASAR KOTA RENGAT

ABSTRAK

**OLEH :
SYUKURIANTO**

Penanganan sampah di lingkungan masyarakat masih menjadi permasalahan yang serius dimana sampah yang masih berserakan tanpa adanya penanganan yang serius oleh Pemerintah Daerah. Penanganan sampah di pasar Kota Rengat belum dilakukan maksimal oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu sehingga masih banyak sampah yang berserakan di karenakan pengangkutan sampat belum dilakukan disetiap harinya. Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu dalam penanganan sampah meliputi Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas dan Ketepatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui serta faktor penghambat Evaluasi Tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Pengangkutan Sampah Di Pasar Kota Rengat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan Teknik pengumpulan data melalui Observasi, wawancara dan Dokumentasi. Pembahasan Penanganan sampah di pasar Kota Rengat belum dilakukan dengan maksimal sehingga mengakibatkan penumpukan sampah. Kesimpulan Tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Pengangkutan Sampah Di Pasar Kota Rengat sudah terlaksana namun belum maksimal dimana diketahui ketetapan waktu pengangkutan sampah tidak tepat waktu, belum adanya penambahan tempat sampah agar sampah dapat tertampung seluruhnya sehingga menimbulkan penumpukan sampah tidak pada tempatnya. Saran peneliti yaitu agar Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu melakukan pengangkutan sampah di setiap harinya, penambahan petugas pengangkutan sampah, dan menambah jumlah armada pengangkutan sampah.

Kata Kunci : Evaluasi, Tugas, Sampah.

**EVALUATION OF THE DEPARTMENT OF THE ENVIRONMENT OF
INDRAGIRI HULU DISTRICT IN WASTE TRANSPORTATION IN
MARKETS OF RENGAT CITY**

ABSTRACT

**BY :
SYUKURIANTO**

Waste handling in the community is still a serious problem where garbage is still scattered without serious handling by the Regional Government. The Environmental Service of Indragiri Hulu Regency has not handled the waste optimally in Rengat City, so there is still a lot of garbage scattered about because the transportation of the canoes has not been carried out every day. Indragiri Hulu Regency Environmental Agency policies in handling solid waste include Effectiveness, Efficiency, Adequacy, Leveling, Responsiveness and Accuracy. The purpose of this study was to determine the inhibiting factors in evaluating the task of the Indragiri Hulu Regency Environmental Service in transporting garbage at the Rengat City Market. The research method used is a quantitative method with data collection techniques through observation, questionnaires, interviews and documentation. Discussion The handling of waste at the Rengat City market has not been carried out optimally, resulting in accumulation of garbage. Conclusion The task of the Environmental Service of Indragiri Hulu Regency in Transporting Garbage at the Rengat City Market has been carried out but it has not been maximized where it is known that the time frame for transporting waste is not yet on time, there has been no addition of trash bins so that waste can be accommodated perfectly resulting in improper accumulation of garbage. Researchers suggest that the Environmental Agency of Indragiri Hulu Regency carry out daily waste collection, increase garbage collection officers, and increase the number of waste collection fleets.

Keywords: Evaluation, Task, Garbage.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan di bentuknya Negara Republik Indonesia dalam pembukaan UUD 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social. Untuk mencapai tujuan Negara tersebut di susunlah pemerintahan secara bertingkat mulai dari pusat sampai ke daerah. Hal ini sejalan dengan isi Pasal 18 UUD 1945 menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam rangka mewujudkan tujuan negara sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan UUD Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, maka disusunlah Pemerintahan Indonesia sebagai Negara Kesatuan yang mempunyai 2 bentuk pemerintahan yaitu pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Dalam pasal 18 disebutkan wilayah Indonesia di bagi atas wilayah provinsi dan provinsi dibagi kedalam Kabupaten atau Kota.

Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Tugas-tugas pokok tersebut

dapat diringkas menjadi 3 (tiga) fungsi hakiki yaitu: pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*), dan pembangunan (*development*). Pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat, pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat, dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.

Pelaksanaan otonomi daerah sebagai konsekuensi dilaksanakannya asas desentralisasi memang telah banyak memberikan angin segar, terutama terhadap daerah. Dengan dijalankan sistem desentralisasi ini berarti daerah diberikan kewenangan yang luas untuk mengatur rumah tangganya secara otonom. Pada hakikatnya tujuan dari keberadaan otonomi daerah ini adalah untuk memberi peluang pada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintahan baik urusan wajib maupun urusan pilihan.

Dalam rangka memberikan jaminan terhadap kedudukan, tugas dan wewenang Pemda, maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Sesuai dengan yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UndangUndang ini menekankan pada daerah agar mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

Berdasarkan pasal 9 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pemerintah pusat menyerahkan sejumlah urusan pada

daerah, Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan tersebut yaitu :

- a. Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Definisi Pusat jika kita masuk bidang eksekutif adalah Pemerintah Pusat, definisinya sendiri adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri. Cakupan urusan pemerintahan absolut terdiri dari masalah bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal serta agama.
- b. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah kemudian dibagi menjadi 2 bagian, pertama urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan wajib ini kemudian dibagi lagi dalam 2 bagian yaitu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.
- c. Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Urusan ini meliputi pembinaan ketahanan nasional, kerukunan antar umat

beragama, persatuan dan kesatuan bangsa, penanganan konflik social, pembinaan kerukunan antar suku ataupun intrasuku, koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada diwilayah daerah provinsi dan kota/ kabupaten, pengembangan kehidupan demokrasi dan, pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan kewenangan daerah.

Sebagai satuan pemerintahan daerah, daerah diberi sejumlah urusan pemerintahan, yang salah satu diantaranya urusan kewenangan sehingga di daerah ada urusan wajib dan urusan pilihan. Dalam pasal 12 Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang di wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, yang diberikan dengan pelayanan dasar, meliputi :

- a. Pendidikan
- b. Kesehatan
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang.
- d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman
- e. Ketentraman, Ketertiban umum, dan Pelindungan Masyarakat
- f. Sosial

Urusan Pemerintahan yang wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, meliputi :

- 1. Tenaga kerja
- 2. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- 3. Pangan
- 4. Pertanahan
- 5. Lingkungan hidup

6. Administrasi kependudukan dan pencacatan sipil
7. Pemberdayaan masyarakat Desa
8. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
9. Perhubungan
10. Komunikasi dan informatika
11. Koperasi, usaha kecil dan menengah
12. Penanaman modal
13. Kepemudaan dan olahraga
14. Statistik
15. Persandian
16. Kebudayaan
17. Perpustakaan
18. Kearsipan

Dari sejumlah urusan-urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota, salah satunya Urusan Pemerintahan yang wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dalam bidang lingkungan hidup yang salah satunya adalah menangani masalah persampahan. Hal ini dianggap penting karena populasi dan kebutuhan hidup meningkat sehingga menyebabkan bertambahnya jumlah persampahan. Hal ini mengakibatkan permasalahan sampah menjadi kompleks, antara lain sampah tidak terangkut dan terjadi pembuangan sampah liar. Sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan dan mengganggu kelestarian fungsi lingkungan.

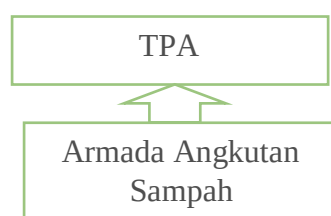
Kabupaten Indragiri Hulu merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Riau yang memiliki luas wilayah 8.198,26 km² dengan jumlah populasi 363.442 jiwa dan membawahi 14 kecamatan. Untuk menangani masalah persampahan tersebut, pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu membentuk Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu.

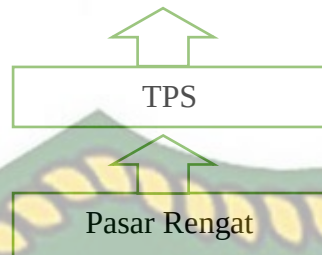
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 58 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu diatas dalam pengangkutan sampah dilaksan oleh Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Peningkatan Kapasitas dengan membawahi secara khusus pelaksana dilapangan dalam pengangkutan sampah dimana dikatakan pada pasal 13 Seksi Pengelolaan Sampah Dan Pengangkutan adalah pelaksana secara langsung pengangkutan sampah dilapangan.

Peraturan Bupati Nomor 58 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu pada Seksi Pengelolaan Sampah Dan Pengangkutan pada pasal 13 point J antara lain mengkoordinasikan, memilah, mengumpulkan, mengangkut, dan memproses akhir sampah.

Salah satu tugas yang diemban oleh Seksi Pengelolaan Sampah Dan Pengangkutan adalah mengkoordinasikan, memilah, mengumpulkan, mengangkut, dan memproses akhir sampah tentunya hal ini bertujuan agar sampah yang ada dipasar Rengat dapat di angkut tanpa menimbulkan penumpukan. Adapun bentuk alur kegiatan dalam pengangkutan sampah di pasar kota rengat sebagai berikut :

Gambar I.1. Alur Kegiatan Dalam Pengangkutan Sampah Di Pasar Kota Rengat





Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu, 2020

Berdasarkan penjelasan gambar diatas bahwa alur pengangkutan sampah dimulai dari penyediaan tempat penampungan sampah sementara di pasar Rengat dan dilakukan pengangkutan sampah dengan armada angkutan sampah yaitu mobil colt diesel di setiap harinya dan hasil pengangkutan sampah dari Pasar Rengat di tumpukkan kemabali di tempat penampungan akhir sampah unuk diproses.

Adapun jumlah produksi sampah di pasar Kecamatan Rengat adalah sebagai berikut :

Tabel I.1 Jumlah Pasar Di Kecamatan Rengat

No	Nama pasar	Jumlah produksi sampah Per hari
1	Pasar Kota	1,5 Ton
2	Pasar Sri Gading	800 Kg
3	Pasar Besar Seberang	1 Ton
4	Pasar Sore Rengat	500 Kg
5	Pasar Sekip Hilir	700 Kg
6	Pasar Sekip Hulu	900 Kg

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu, 2020

Berdasarkan tabel I.1 diatas terlihat bahwa pasar kota rengat memiliki produksi sampah yang cukup besar dan pasar sore rengat memiliki produksi sampah yang paling kecil di bandingkan pasar lainnya. Oleh karena itu penulis

memfokuskan pada pasar kota rengat dengan alasan bahwa pasar kota rengat memiliki produksi sampah yang cukup besar dibandingkan dengan pasar lainnya.

Pasar Kota Rengat merupakan salah satu pasar tradisional yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu. Pasar ini terletak di jalan Agus Salim Desa Sekip Hulu Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu. Selain itu juga pasar ini memiliki luas tanah seluas 9.597 m² dengan luas bangunan ±6.000 m² dan memiliki 3 lantai. Pasar Kota Rengat juga merupakan salah satu pasar penghasil sampah yang cukup besar dengan volume sampah di pasar Kota rengat perharinya adalah 42,7 m³ sehingga hal ini sangat dibutuhkan penanganan yang cukup baik dalam hal penanganan sampah.

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dalam pengangkutan sampah, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu di dukung dengan fasilitas sebagai berikut :

Tabel I.2 Sarana Operasional Angkutan Sampah

No	Sarana Operasional	Jumlah
1	Dump Truck	4 unit
2	Pick Up	2 unit
	Jumlah	6 unit

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu, 2020

Berdasarkan tabel I.1 diatas terlihat bahwa pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu hanya memiliki 4 mobil dump truck pengangkut sampah dan pck UP 2 unit namun yang beroperasi hanya 2 Dump Truk di Kabupaten Indragiri Hulu. Hal ini sangat minim dibandingkan luasnya wilayah kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu. Selain itu, pihak Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu mengalami kekurangan petugas pengangkut sampah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel I.3 Jumlah Petugas Lapangan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu

No	Sarana Operasional	Jumlah
1	Petugas Angkut Sampah	5 orang
2	Petugas Operasional Taman	15 orang
	Jumlah	20 unit

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu, 2020

Berdasarkan tabel I.2 diatas, dapat diketahui bahwa jumlah petugas pengangkut sampah di Kabupaten Indragiri Hulu ada sebanyak 5 orang. Hal ini sangat tidak efektif. Oleh karena itulah pelaksanaan tugas pengangkutan sampah belum terlaksana dengan maksimal, hal ini dilihat masih banyaknya tumpukantumpukan sampah terutama di Pasar Kota Rengat sehingga sering kali menimbulkan bau busuk yang sangat mengganggu para pengunjung pasar. Selain itu juga, penulis juga menemukan beberapa fenomena-fenomena yang terjadi dilapangan

1. Diketahui bahwa masih banyaknya tumpukan sampah yang ada di pasar Kota Rengat yang tidak terangkut ke tempat pembuangan akhir sampah.
2. Diketahui bahwa kurangnya ketersediaan jumlah alat pengangkutan sampah sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pengelolaan sampah kota. Hal ini terlihat bahwa hanya sebanyak 4 unit mobil dump truck pengangkut sampah.
3. Terlihat masih kurangnya petugas pemungutan sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu khususnya Bidang Kebersihan

dan Pertamanan sehingga sering terjadi keterlambatan dalam pengangkutan sampah. Hal ini terlihat bahwa hanya sebanyak 5 orang petugas pengangkut sampah.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan diatas, penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Evaluasi Tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Pengangkutan Sampah Di Pasar Kota Rengat”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis menetapkan rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana Pelaksanaan Tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Pengangkutan Sampah Di Pasar Kota Rengat?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Pengangkutan Sampah Di Pasar Kota Rengat.
- b. Untuk mengetahui faktor yang menjadi penghambat Pelaksanaan Tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Pengangkutan Sampah Di Pasar Kota Rengat.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis penulisan ini diharapkan mampu meningkatkan penguasaan teori-teori yang relevan dan pemahaman atas upaya Pengangkutan Sampah Di Pasar Kota Rengat Kabupaten Indragiri Hulu
- b. Secara praktis penulisan ini diharapkan mampu memberi sumbangan pemikiran atau bahan masukan bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Pengangkutan Sampah.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN

A. Studi kepustakaan

Sebagai pedoman dan acuan dalam memecahkan pokok permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini penulis akan memaparkan konsep-konsep atau teori-teori yang ada relevansinya untuk mendukung pemecahan masalah yang dikemukakan diatas.

1. Konsep pemerintahan

Menurut Ndraha (2011:6) pemerintah adalah organisasi yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap orang melalui hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan tuntutan (harapan) yang diperintah. Dalam hubungan ini, bahkan warga negara asing atau siapa saja yang pada suatu saat berada secara sah (legal) di

wilayah Indonesia, berhak menerima layanan sipil tertentu, dan pemerintah wajib melayaninya.

Secara umum pemerintah dapat didefinisikan sebagai organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum secara undang – undang di wilayah tertentu. Pemerintah merupakan sebuah organisasi yang memiliki:

1. Otoritas yang memerintah dari suatu unit politik
2. Kekuasaan yang memerintah suatu masyarakat politik (political will)
3. Aparatur yang merupakan badan pemerintah yang berfungsi dan menjalankan kekuasaan.
4. Kekuasaan untuk membuat peraturan prundang – undangan untuk menangani perselisihan dan membicarakan putusan administrasi dan dengan monopoli atas kekuasaan yang sah.

Adapun tugas pemerintah menurut Rasyid (1996: 37-38) menegaskan bahwa Tugas pokok pemerintahan yang sudah dirincikan mencakupi tujuh bidang pelayanan didalam tulisannya, dapat diringkas menjadi empat fungsi yang hakiki, yaitu : pelayanan (service), pemberdayaan (empowerment), pembangunan (development) dan pembinaan (directing). Inilah yang sekaligus menjadi misi pemerintahan ditengah – tengah masyarakat.

Pemerintahan berasal dari kata “perintah” yang setelah ditambah awalan “pe” menjadi pemerintah, dan ketika ditambah akhiran “an” menjadi pemerintahan, dalam hal ini beda antara “pemerintah” dengan “pemerintahan” adalah karena pemerintah merupakan badan atau organisasi yang bersangkutan,

sedangkan pemerintahan berarti perihal ataupun hal ikhwal pemerintahan itu sendiri (Syafiie, 2011:4).

Menurut Ndraha (2002:10) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa publik dan layanan civil dalam hubungan pemerintahan (sehingga diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.

Menurut musanef (dalam Syafiie 2011:7) menyebutkan bahwa ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur – unsur dinas, berhubungan dengan keserasian kedalam dan hubungan antara dinas – dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya diwakili oleh dinas itu.

Menurut Soemandar (dalam Syafiie, 2011:8) mengatakan bahwa pemerintahan sebagai badan yang penting dalam rangka pemerintahannya, pemerintahan musti memperlihatkan pula ketentraman dan ketertiban umum, tuntutan dan harapan serta pendapat rakyat, kebutuhan dan kepentingan masyarakat, pengaruh – pengaruh lingkungan, pengaturan – pengaturan, komunikasi peran serta seluruh lapisan masyarakat dan legitimasi.

Sedangkan pemerintahan adalah segala daya upaya suatu Negara atau wilayah untuk mencapai tujuannya penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan bagi pelaksanaan pembangunan dan pemerintah diharapkan dapat terlaksana dengan kualitas dan kemampuan dari penyelenggara tersebut, selain pelaksanaan tugas pemerintah umum yang telah ada maka pemerintahan kecamatan juga

melaksanakan tugas umum pemerintahannya yang merupakan sebagai pendukung dari tugas pemerintahan umum yang ada (Musaneff, 1997:15)

Kemudian fungsi utama pemerintah dalam mengembangkan tugas dan tanggung jawabnya ditentukan oleh beberapa factor antara lain (Rasyid 1997:96):

1. Tingkat efektivitas dan efisiensi yang dapat dicapai dalam organisasi yang membawakan peranan-peranan yang disepakati, ini berkenaan dengan cara mengkoordinasikan kebijakan-kebijakan yang telah dibangun dengan baik, baik secara manajerial maupun personal.
2. Program-program pengelolaan yang mencakup pengambilan keputusan secara umum berkenaan dengan mendefinisikan masalah yang dihadapi serta perumusan jalan keluar yang layak atas masalah itu.

Menurut Munaf (2015; 47) pemerintahan dimaknai sebagai suatu proses menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintahan/ Negara.

Menurut Robert Mac Iver (dalam Yusri Munaf 2015; 47) bentuk-bentuk pemerintahan mengemukakan bahwa ikhtisar format pemerintahan yang berbasis pada kontitusi oligarki dan pemerintahan yang pada konstitusi demokrasi yaitu :

1. Bentuk pemerintahan berbasis pada konstitusi oligarki adalah pemerintah yang bersifat monarkis (monarchy), pemerintahan yang bersifat diktatoris (Distatorship), pemerintahan yang bersifat teokratis, dan pemerintahan yang bersifat pluraristik (Plural headship).
2. Bentuk pemerintahan yang berbasis pada konstitusi oligarki adalah konstiusi demokrasi (Democracy) adalah system pemrintahan monarkis dengan kekuasaan yang terbatas dan system pemerintahan dengan pola

republik. Dalam perkembangannya, system pemerintahan dengan pola republik semakin memperkuat bentuk pemerintahan yang demokratis. Pada dasarnya bentuk-bentuk pemerintahan demokrasi adalah limited monarchy kemudian berkembang menjadi pemerintahan republik.

Bentuk pemerintahan pada dasarnya menyatakan struktur organisasi dan fungsi pemerintahan. Kopstein dan Lichbach (dalam Yusri Munaf, 2015; 48) mengatakan bahwa bentuk pemerintahan suatu istilah yang digunakan untuk merujuk pada rangkaian institusi politik yang digunakan untuk mengorganisasikan suatu Negara untuk menegaskan kekuasaannya atas suatu komunikasi politik.

Berdasarkan teori diatas bahwa pemerintah baik pusat maupun daerah mempunyai fungsi utama dalam negosiasi dan menggali berbagai kepentingan warga Negara dan berbagai kelompok komunitas yang ada dalam memberikan pelayanan, baik pelayanan perorangan maupun pelayanan publik, pembangunan fasilitas ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memberi perlindungan kepada masyarakat

2. Konsep Tugas

Menurut Himawan (2014:38) Tugas adalah suatu kewajiban yang harus dikerjakan, pekerjaan yang merupakan tanggung jawab, perintah untuk berbuat atau melakukan sesuatu demi mencapai suatu tujuan. Tugas pokok sebagai satu kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang paling utama dan rutin dilakukan oleh para pegawai dalam sebuah organisasi yang memberikan gambaran tentang ruang lingkup atau kompleksitas jabatan atau organisasi demi mencapai tujuan tertentu.

Menurut Admosudirjo. (2011:94) Tugas pokok dan fungsi secara umum merupakan hal-hal yang harus bahkan wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai dalam suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan misi suatu organisasi. Setiap pegawai seharusnya melaksanakan kegiatan yang lebih rinci yang dilaksanakan secara jelas dan dalam setiap bagian atau unit. Rincian tugas-tugas tersebut digolongkan kedalam satuan praktis dan konkrit sesuai dengan kemampuan dan tuntutan masyarakat. Tugas pokok dan fungsi merupakan suatu kesatuan yang saling terkait antara tugas pokok dan fungsi. Suatu organisasi menyelenggarakan fungsi-fungsi dalam melaksanakan tugas pokok.

Menurut Soewarno (2011:76) Tugas Pokok dan Fungsi secara umum merupakan hal-hal yang harus bahkan wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai dalam suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan misi suatu organisasi.

Setiap pegawai seharusnya melaksanakan kegiatan yang lebih rinci yang dilaksanakan secara jelas dan dalam setiap bagian atau unit. Rincian tugas-tugas tersebut digolongkan kedalam satuan praktis dan konkrit sesuai dengan kemampuan dan tuntutan masyarakat.

Menurut Marista (2008:86) tugas itu sendiri telah dijelaskan sebelumnya adalah suatu kewajiban yang harus dikerjakan, pekerjaan

yang merupakan tanggung jawab, perintah untuk berbuat atau melakukan sesuatu demi mencapai suatu tujuan.

Berdasarkan definisi tugas di atas, dapat kita simpulkan bahwa tugas pokok adalah kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang paling utama dan rutin dilakukan oleh para pegawai dalam sebuah organisasi yang memberikan gambaran tentang ruang lingkup atau kompleksitas jabatan atau organisasi demi mencapai tujuan tertentu.

3. Asas Dekonsentrasi dan Asas Tugas Pembantuan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dikatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahannya menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Dekonsentrasi dan tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintah dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi. Disamping itu, sebagai konsekuensi negara kesatuan memang

tidak dimungkinkan semua wewenang pemerintah didesentralisasikan dan didelegasikan sekalipun kepada daerah.

Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada wilayah provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi. Gubernur sebagai kepala daerah provinsi berfungsi pula selaku

wakil Pemerintah di daerah, dalam pengertian untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah kabupaten dan kota. Dasar pertimbangan dan tujuan diselenggarakannya asas dekonsentrasi yaitu:

- a. terpeliharanya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. terwujudnya pelaksanaan kebijakan nasional dalam mengurangi kesenjangan antar daerah;
- c. terwujudnya keserasian hubungan antar susunan pemerintahan dan antarpemerintahan di daerah;
- d. teridentifikasinya potensi dan terpeliharanya keanekaragaman sosial budaya daerah;
- e. tercapainya efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, serta pengelolaan pembangunan dan pelayanan terhadap kepentingan umum masyarakat; dan
- f. terciptanya komunikasi sosial kemasyarakatan dan sosial budaya dalam system administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan asas tugas pembantuan adalah cerminan dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi penugasan. Tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi. Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan

efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan pembangunan bagi daerah dan desa.

Tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada daerah dan/atau desa meliputi sebagian tugas-tugas Pemerintah yang apabila dilaksanakan oleh daerah dan/atau desa akan lebih efisien dan efektif. Tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah provinsi sebagai daerah otonom kepada kabupaten/kota dan/atau desa meliputi sebagian tugas-tugas provinsi, antara lain dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten dan kota, serta sebagian tugas pemerintahan dalam bidang tertentu lainnya, termasuk juga sebagian tugas pemerintahan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten dan kota.

Tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada desa mencakup sebagian tugas-tugas kabupaten/kota di bidang pemerintahan yang menjadi wewenang kabupaten/kota. Penyelenggaraan ketiga asas sebagaimana diuraikan tersebut di atas memberikan konsekuensi terhadap pengaturan pendanaan. Semua urusan pemerintahan yang sudah diserahkan menjadi kewenangan pemerintah daerah harus didanai dari APBD, sedangkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah harus didanai dari APBN melalui bagian anggaran kementerian/lembaga. Pengaturan pendanaan kewenangan Pemerintah melalui APBN mencakup pendanaan sebagian

urusan pemerintahan yang akan dilimpahkan kepada gubernur berdasarkan asas dekonsentrasi, dan sebagian urusan pemerintahan yang akan ditugaskan kepada daerah provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan asas tugas pembantuan.

Hal ini sejalan dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa perimbangan keuangan antara Pemerintah dan pemerintahan daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan atas penyelenggaraan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

Sejalan dengan hal itu, maka penyerahan wewenang pemerintahan, pelimpahan wewenang pemerintah, dan penugasan, dan tugas pembantu juga harus diikuti dengan pengaturan pendanaan dan pemanfaatan sumber daya nasional secara efisien dan efektif.

Berdasarkan pokok-pokok pemikiran sebagaimana yang diuraikan di atas, maka penyelenggaraan dan pengelolaan dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan menjadi sangat penting untuk diberikan pengaturan secara lebih mendasar dan komprehensif. Berikut akan dijabarkan lebih lanjut berkenaan dengan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Ruang lingkup dekonsentrasi dan tugas pembantuan mencakup aspek penyelenggaraan, pengelolaan dana, pertanggungjawaban dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan, pemeriksaan, serta sanksi. Penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (PP 7/2008), meliputi:

- a. Pelimpahan urusan pemerintahan;

- b. Tata cara pelimpahan;
- c. Tata cara penyelenggaraan; dan
- d. Tata cara penarikan pelimpahan.

Pengelolaan dana dekonsentrasi dalam Pasal 8 PP 7/2008 meliputi:

- 1) Prinsip pendanaan;
- 2) Perencanaan dan penganggaran;
- 3) Penyaluran dan pelaksanaan; dan
- 4) Pengelolaan barang milik negara hasil pelaksanaan dekonsentrasi.

Pertanggungjawaban dan pelaporan dekonsentrasi dalam Pasal 8 PP 7/2008 meliputi:

- a. Penyelenggaraan dekonsentrasi; dan
- b. Pengelolaan dana dekonsentrasi.

Penyelenggaraan tugas pembantuan dalam Pasal 8 PP 7/2008 meliputi:

- 1) Penugasan urusan pemerintahan;
- 2) Tata cara penugasan;
- 3) Tata cara penyelenggaraan; dan
- 4) Penghentian tugas pembantuan.

Pengelolaan dana tugas pembantuan dalam Pasal 8 PP 7/2008 meliputi:

- a. Prinsip pendanaan;
- b. Perencanaan dan penganggaran;
- c. Penyaluran dan pelaksanaan; dan
- d. Pengelolaan barang milik negara hasil pelaksanaan tugas pembantuan.

Pertanggungjawaban dan pelaporan tugas pembantuan dalam Pasal 8 PP 7/2008 meliputi:

- a. Penyelenggaraan tugas pembantuan; dan
- b. Pengelolaan dana tugas pembantuan.

Pelimpahan Urusan Pemerintahan dalam penyelenggaraan dekonsentrasi berdasarkan Pasal 11 PP 7/2008 meliputi: (1) Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dapat dilakukan kepada gubernur. (2) Selain dilimpahkan kepada gubernur, sebagian urusan pemerintahan dapat pula dilimpahkan kepada: (a) instansi vertikal; (b) pejabat Pemerintah di daerah. Jangkauan pelayanan atas penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan dapat melampaui satu wilayah administrasi pemerintahan provinsi.

Untuk urusan pemerintahan yang dapat dilimpahkan kepada gubernur dalam Pasal 13 ayat (3) PP 7/2008, didanai dari APBN bagian anggaran kementerian/lembaga melalui dana dekonsentrasi. Pendanaan dalam rangka dekonsentrasi dialokasikan untuk kegiatan yang bersifat non-fisik. Penyaluran dana dekonsentrasi dilakukan oleh Bendahara Umum Negara atau kuasanya melalui Rekening Kas Umum Negara. Penerimaan sebagai akibat pelaksanaan dekonsentrasi merupakan penerimaan negara dan wajib disetor oleh Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran ke Rekening Kas Umum Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Semua barang yang dibeli atau diperoleh dari pelaksanaan dana dekonsentrasi merupakan barang milik negara. Barang milik negara tersebut dapat dihibahkan kepada daerah.

Pertanggungjawaban dan pelaporan dekonsentrasi mencakup aspek manajerial dan aspek akuntabilitas. Aspek manajerial terdiri dari perkembangan realisasi penyerapan dana, pencapaian target keluaran, kendala yang dihadapi, dan saran tindak lanjut. Aspek akuntabilitas terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, catatan atas laporan keuangan, dan laporan barang. Kepala SKPD provinsi bertanggung jawab atas pelaporan kegiatan dekonsentrasi. Kepala SKPD provinsi selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dekonsentrasi bertanggung jawab atas pelaksanaan dana dekonsentrasi.

Berkenaan dengan tugas pembantuan, pemerintah dapat memberikan tugas pembantuan kepada pemerintah provinsi atau kabupaten/kota dan/atau pemerintah desa untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan. Pemerintah provinsi, juga dapat memberikan tugas pembantuan kepadapemerintah kabupaten/kota dan/atau pemerintah desa untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan provinsi, serta, Pemerintah kabupaten/kota dapat memberikan tugas pembantuan kepada pemerintah desa untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan kabupaten/kota.

Urusan pemerintahan yang dapat ditugaskan dari Pemerintah kepada pemerintah provinsi atau kabupaten/kotadan/atau pemerintah desa merupakan sebagian urusan pemerintahan diluar 6 (enam) urusan yang bersifat mutlak yang menurut peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai urusan Pemerintah. Urusan pemerintahan yang dapat ditugaskan dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dan/atau pemerintah desa merupakan sebagian urusan pemerintahan yang menurut peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai

urusan pemerintah provinsi. Urusan pemerintahan yang dapat ditugaskan dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa merupakan sebagian urusan pemerintahan yang menurut peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai urusan pemerintah kabupaten/kota.

Urusan pemerintahan yang dapat ditugaskan dari Pemerintah kepada pemerintah provinsi atau kabupaten/kota dan/atau pemerintah desa didanai dari APBN bagian anggaran kementerian/lembaga melalui dana tugas pembantuan. Urusan pemerintahan yang ditugaskan dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dan/atau pemerintah desa didanai dari APBD provinsi. Urusan pemerintahan yang ditugaskan dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa didanai dari APBD kabupaten/kota.

Pendanaan dalam rangka tugas pembantuan dialokasikan untuk kegiatan yang bersifat fisik. Semua barang yang dibeli atau diperoleh dari pelaksanaan dana tugas pembantuan merupakan barang milik negara. Barang milik negara dapat dihibahkan kepada daerah. Penghibahan, penatausahaan, penggunaan dan pemanfaatan barang dalam Pasal 57 ayat (2) PP 7/2008, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan barang milik negara/daerah. Pertanggungjawaban dan pelaporan tugas pembantuan juga mencakup aspek manajerial dan aspek akuntabilitas. Aspek manajerial terdiri dari perkembangan realisasi penyerapan dana, pencapaian target keluaran, kendala yang dihadapi, dan saran tindak lanjut. Aspek akuntabilitas terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, catatan atas laporan keuangan, dan laporan barang. Kepala SKPD provinsi atau kabupaten/kota selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang tugas pembantuan

bertanggung jawab atas pelaksanaan dana tugas pembantuan. Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK atas pengelolaan dan pertanggungjawaban dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan keuangan berupa pemeriksaan atas laporan keuangan. Pemeriksaan kinerja berupa pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri dari pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi serta aspek efektivitas.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK atas pengelolaan dan pertanggungjawaban dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan keuangan berupa pemeriksaan atas laporan keuangan. Pemeriksaan kinerja berupa pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri dari pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi serta aspek efektivitas. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu meliputi pemeriksaan atas hal-hal lain di bidang keuangan, pemeriksaan investigatif, dan pemeriksaan atas sistem pengendalian intern Pemerintah

4. Konsep Pelimpahan Kewenangan

Menurut pendapat wasistiono (2009:47) yang mengemukakan kewenangan adalah kekuasaan yang sah (*legitimate power*) atau kekuasaan yang terlambangkan (*institutionalized power*). Dan kekuasaan pada dasarnya adalah merupakan kemampuan yang membuat seseorang atau orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sesuai keinginannya. Dalam pengertian administrasi, hal ini diarahkan untuk mencapai tujuan bersama (organisasi),

dengan demikian disimpulkan bahwa dalam kewenangan terdapat kekuasaan, dan sebaliknya. Jadi kewenangan dan kekuasaan pada dasarnya merupakan dua sisi yang tidak dapat dipisahkan.

Sedangkan dalam Ensiklopedia administrasi (dalam Wasistiono dkk, 2009:49), wewenang didefinisikan sebagai hak seorang pejabat untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas dan tanggung jawabnya dapat dilaksanakan dengan baik.

Pendelegasian atau pelimpahan kewenangan (*delegation of authority*) dapat dilihat dari beberapa aspek, yakni aspek tugas, tanggung jawab dan wewenang. Pada prinsipnya, pendelegasian atau pelimpahan sama dengan penyerahan, jadi pendelegasian atau kewenangan berarti penyerahan sebagian hak untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas dan tanggung jawabnya dapat dilaksanakan dengan baik dari pejabat satu ke pejabat lainnya. Menurut Sutarto (2002:144-145), pelimpahan kewenangan itu bukan penyerahan hak dari atasan kepada bawahan, melainkan penyerahan hak dari pejabat ke pejabat. Format pendelegasian wewenang dapat dilakukan oleh pejabat yang berkedudukan lebih tinggi (*superior*) kepada pejabat yang kedudukan rendah (*subordinate*) atau pejabat atasan kepada pejabat bawahan, disamping itu pelimpahan wewenang dapat dilakukan diantara pejabat yang berkedudukan pada jenjang yang sama atau pejabat yang sederajat. Pelimpahan wewenang menegak atau vertical, sedangkan pelimpahan wewenang yang kedua diartikan pelimpahan wewenang mendatar atau horizontal.

Dilihat dari sumbernya kewenangan dapat menjadi 2 jenis (Wasistiono, 2009:26), yaitu :

1. Kewenangan atributif, adalah kewenangan yang melekat dan diberikan kepada suatu institusi atau pejabat yang berdasarkan peraturan perundang-undang.
2. Kewenangan delegatif, adalah kewenangan yang berasal dari pendelegasian kewenangan dari institusi atau pejabat yang lebih tinggi.

Masing-masing pejabat diberikan tugas melekat sebagai bentuk tanggung jawab agar tugas yang diberikan itu dapat dilaksanakan dengan baik. Tanggung jawab merupakan keharusan pada seseorang pejabat atau melaksanakan secara layak segala sesuatu yang telah dibebankan kepadanya. Tanggung jawab hanya dapat dipenuhi bila pejabat yang bersangkutan disertai dengan wewenang tertentu dalam bidang dan tugasnya. Dengan tindakan otoritas itu, tanggung jawab tidak dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Jadi ada kolerasi antara tugas, tanggung jawab dan wewenang.

5. Konsep kebijakan

Istilah kebijakan atau sebagian orang mengistilahkan kebijakan sering kali disamakan pengertiannya dengan policy. Hal tersebut barang kali dikarenakan sampai saat ini belum diketahui terjemahan yang tepat istilah policy ke dalam bahasa Indonesia.

Secara umum istilah kebijakan atau policy digunakan untuk menunjuk perilaku seorang actor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu (Winarno, 2012:19).

Menurut Dunn (2003:105) perumusan kebijakan adalah merupakan suatu informasi yang relevan dengan kebijakan guna dimanfaatkan pada tingkat politik dalam rangka pemecahan suatu masalah, adapun indikasi dari perumusan masalah kebijakan ini adalah:

1. Pengelolaan informasi yaitu usaha yang dilakukan oleh setiap badan atau instansi yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam pembuatan suatu kebijakan.
2. Penetapan alternative-alternatif, merupakan penilaian yang diperoleh dari beberapa usulan yang ada.
3. Penerapan sarana keputusan, menggunakan berbagai potensi yang dimiliki oleh badan/instansi tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan,
4. Penilaian terhadap isi kebijakan, melakukan tindakan evaluasi yang dilakukan oleh pembuat kebijakan.

Selanjutnya Rose (dalam Winarno, 2012:20) menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai “serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan dari pada sebagai suatu keputusan sendiri”.

Anderson (dalam Winarno, 2012:21) kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi masalah ataupun personalnya.

Menurut Dunn (2003:105) perumusan kebijakan adalah merupakan suatu informasi yang relevan dengan kebijakan guna dimanfaatkan pada tingkat politik

dalam rangka pemecahan suatu masalah. Adapun indikasi dari pada perumusan kebijakan ini adalah:

1. Pengelolaan informasi yaitu usaha yang dilakukan oleh setiap badan atau instansi yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam pembuatan suatu kebijakan
2. Penetapan alternative-alternatif, merupakan penilaian yang diperoleh dari beberapa usulan yang ada.
3. Penerapan sarana keputusan, menggunakan berbagai potensi yang dimiliki oleh badan/instansi tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan.
4. Penilaian terhadap isi kebijakan, meakukan tindakan evaluasi yang dilakukan oleh pembentukan kebijakan.

Untuk memecahkan, mengurangi atau mencegah terjadinya suatu masalah, diperlukan suatu kebijakan yang diformulasikan dengan mempunyai fungsi dan sasaran tertentu, dimana untuk mencapai tujuan dan sasaran dari kebijakan tetentu diperlukan suatu implementasi dari kebijakan itu sendiri yang merupakan peroses lebih lanjut dari tahap formulasi kebijakan hal ini sesuai dengan pendapat (Abidin 2002:20).

Banyak pakar menyebutkan bahwa kebijakan pemerintah sebagai kekuasaan pengalokasian nilai-nilai untuk masyarakat secara keseluruhan. Ini mengandung konotasi tentang kewenangan pemerintah yang meliputi keseluruhan kehidupan masyarakat kecuali pemerintah. Menurut Carl Friedman mengatakan

bahwa yang paling pokok bagi suatu kebijakan adalah tujuan (goal), sasaran (objective), atau kehendak (purpose). (Abidin, 2002:20)

Perbuatan kebijakan merupakan suatu aktivitas yang diarah tujuannya sebagai yang memiliki ciri tersendiri dari aktivitas dan ekspresif murni yang bertujuan untuk mempengaruhi prospektif (masa depan) alternative dalam arah yang dikehendaki. (Tangkilisan, 2003:6).

Kemudian Ibrahim (2004:2) mengemukakan bahwa kebijakan itu adalah prosedur memformulasikan suatu yang berdasarkan aturan tertentu, disebutkan juga bahwa kebijaksanaan itu bentuknya nyata (praktis) dari kebijakan.

Selanjutnya istilah public adalah dalam rangkaian kata public policy mengandung tiga konotasi: pemerintah, masyarakat dan umum (Abidin, 2002:10). Sedangkan menurut Nugroho (2006:25) kebijakan public adalah kebijakan yang mengatur kehidupan bersama atau kehidupan publik, bukan kehidupan seseorang atau golongan.

Kebijakan publik menurut Dwijowijoto (2008:58) adalah keputusan yang dibuat oleh Negara khususnya pemerintah sebagai strategi untuk tujuan Negara yang bersangkutan. kebijakan publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju masyarakat yang dicita-citakan.

Kebijakan publik menurut Dwijowijoto (2008:59) dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Regulasi versus deregulatif : kebijakan yang menetapkan hal-hal yang dibatasi dan hal-hal yang dibebaskan dari pembatasan-pembatasan.

2. Alokasi versus distributive : kebijakan yang berkenaan dengan anggaran atau keuangan publik

Sedangkan menurut Nugroho (2006:25) kebijakan publik adalah kebijakan yang mengatur kehidupan bersama atau kehidupan atau kehidupan publik, bukan kehidupan seseorang atau golongan.

Kita melihat bahwa ada empat kegiatan pokok yang berkenaan dengan kebijakan publik, yaitu :

1. Perumusan kebijakan
2. Implementasi kebijakan
3. Evaluasi kebijakan
4. Revisi kebijakan yang merupakan perumusan kembali dari kebijakan.

Menurut Easton kebijakan pemerintah adalah kewenangan atau pengalokasian nilai-nilai bagi masyarakat secara menyeluruh, berarti yang berwenang mengatur secara menyeluruh kepentingan masyarakat adalah pemerintah. (dalam Lubis 2007:8).

6. Konsep Evaluasi

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, evaluasi adalah suatu penilaian dimana penilaian itu ditujukan pada orang yang lebih atau kepada orang yang lebih rendah, baik itu dari jabatan setrukturnya atau orang yang lebih rendah keahliannya. Evaluasi adalah suatu proses penelitian positif dan negatif atau juga gabungan dari keduanya. (Depdikbud, 2002:45).

Adapun Nurcholis (2005:169) evaluasi merupakan suatu proses yang mendasarkan diri pada disiplin ketat dan tahap waktu. Maka dapat mengetahui

hasil dari kegiatan atau program yang telah direncanakan. Dengan evaluasi dapat diketahui hambatan-hambatan atau kendala yang terjadi dari suatu kegiatan.

Dunn (2003:609) istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjukkan pada aplikasi berada skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran, pemberian angka dan penilaian yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti suatu nilai. Dalam arti spesifik, evaluasi berkenaan dengan produk informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan.

Selanjutnya kriteria evaluasi menurut Dunn (2003:610) adalah sebagai berikut :

1. Efektifitas, apakah hasil yang diinginkan telah tercapai
2. Efisiensi, yaitu berapa usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.
3. Kecukupan, yaitu seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah
4. Pemerataan adalah apakah biaya yang tersedia telah tersedia, telah dimanfaatkan, dan telah didistribusikan secara merata.
5. Responsivitas, adalah apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, profesi, dan nilai kelompok-kelompok tertentu.
6. Ketetapan, adalah apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai.

Menurut Dunn (2003:187) evaluasi memiliki tiga fungsi utama dalam analisis kebijakan, yaitu :

1. Evaluasi memberi informasi yang salah dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan yang telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Dalam hal ini evaluasi mmengungkapkan sebara jauh tujuan-tujuan tertentu dan target tertentu dan target tertentu telah dicapai.
2. Evaluasi memberi sumbangan pada klasifikasi dan keritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoprasikan tujuan dan target.
3. Evaluasi memberi sumbangan pada palikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Informasi tentang tidak memadai kinerja kebijakan yang dapat memberi sumbangan pada perumusan ulang masalah kebijakan.

Selanjutnya Subarsono (2009:19) evaluasi dilakukan untuk melihat tingkat kinerja suatu kebijakan, sejauh mana kebijakan tersebut mencapai sasaran dan tujuannya. Evaluasi berguna untuk memberikan bagi kebijakan yang akan supaya lebih baik.

Sedangkan menurut Ndraha (2003:201) evaluasi adalah proses perbandingan antara standar dengan fakta dengan analisis hasilnya. Ada berbagai model evaluasi. Tiga diantaranya sebagai berikut:

1. Model *before-after* yaitu perbandingan antara sebelum ddan sesudah suatu tindakan (perlakuan, treatment). Tolak ukurnya adalah *before*
2. Model Das Sollen – Das Sein, yaitu perbandingan dengan yang seharusnya dengan yang senyatanya. Tolak ukurnya adalah *das solen*.

3. Model Kelompok Kontrol – Kelompok Tes, yaitu perbandingan antara kelompok control (tanpa perlakuan) dengan kelompok tes (diberi perlakuan). Tolak ukurnya adalah kelompok kontrol.

Menurut Finsterbuch dan Motz dalam Subarsono (2005:13) menyatakan bahwa ada empat jenis evaluasi yaitu:

1. Single program after only

Evaluasi single program after-only merupakan desain yang paling lemah karena tidak diketahui juga kelompok sasaran sebelum menerima program.

2. Single program after – before

Evaluasi single program after-before dapat digunakan untuk mengetahui keadaan kelompok sasaran sebelum menerima program tetapi tidak dapat mengetahui efek dari program tersebut.

3. Comparative after only

Evaluasi comparative after only merupakan evaluasi dengan cara membandingkan kelompok sasaran dengan kelompok bukan sasaran. Pada evaluasi jenis ini efek program pada kelompok sasaran tidak diketahui.

4. Comparative before only

Comparative before only merupakan gabungan dari ketiga kelompok diatas. Sehingga kelemahan yang ada ketiga desain diatas dapat diatasi oleh desain evaluasi ini.

Uraian diatas dapat diartikan bahwa evaluasi perlu dilakukan karena tidak semua kebijakan yang dibuat dapat diimplementasikan sesuai rencana atau bahkan sebuah kebijakan tidak dapat dijalankan, sehingga dengan adanya evaluasi dapat

memberikan masukan, kritik dan saran terhadap kebijakan yang dibuat mulai dari implementasi sampai dengan dampak atau hasil dari kebijakan yang terjadi.

7. Konsep Pengawasan

Walaupun perencanaan, menyusun organisasi, menjuruskan dan mengkoordinasi pekerjaan telah dilaksanakan dengan baik, namun tetap perlu bagi manajemen untuk mengadakan “control” pengawasan dan penelitian atas segala macam pekerjaan itu.

“control tidaklah berarti mengontrol saja, namun meliputi juga aspek penelitian, apakah yang dicapai itu sesuai dan sejalan dengan tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan, lengkap dengan rencananya, kebijakan, program dan lain sebagainya dari pada manajemen.

Dengan kata lain pengawasan diperlukan untuk menjamin bahwa pelaksanaan tidak terlalu menyimpang dari rencan, jika ada penyimpangan maka itu diterima secara rasional dan efisien (Panglaykim, 1991;176).

Pengawasan menurut Terry (dalam Syafie, 2011;109) dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu menilai pelaksanaan, dan bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar (ukuran)

Batasan pengawasan yang lain seperti menurut Robbins (2002: 113) bahwa yang dimaksud pengawasan adalah proses mengikuti perkembangan kegiatan untuk menjamin jalannya pekerjaan, dengan demikian dapat selesai

secara sempurna sebagaimana yang direncanakan sebelumnya, dengan pengkoreksian beberapa pemikiran yang saling berhubungan .

Pendapat lain menurut Siagian (dalam Syafie, 2011;110) mengatakan bahwa pengawasan adalah proses pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Defenisi pengawasan menurut Syafiie (2011;12) adalah salah satu fungsi dalam manajemen pemerintah untuk menjamin agar pelaksanaan kerja pemerintah berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan pemerintah, agar masyarakat serta warga bangsa mencapai keadaan adil makmur dalam waktu yang sudah ditentukan bersama.

Sementara itu definisi pengawasan menurut Marnis (2008;329) adalah proses pemantauan kegiatan organisasional untuk mengetahui apakah kinerja actual sesuai dengan standard an tujuan organisasional yang diharapkan.

Menurut Sukarna (2011;110) memberikan definisi pengawasan sebagai membimbing, menertibkan, mengatur dan menguji kebenaran. Oleh karena itu dalam kata pengawasan terungkap arti pembimbing, penertiban dan pengaturan, pemeriksaan serta pengendalian. Oleh karena itu pengawasan mempunyai peran atau kedudukan yang penting sekali dalam manajemen, mengingat mempunyai fungsi untuk menguji apakah pelaksanaan kerja itu teratur, tertib, terarah atau tidak.

Perinsip-perinsip pengawasan menurut Herujito (2001;242) adalah:

1. Mencerminkan sifat dari apa yang diawasi
2. Dapat diketahui dengan segera penyimpangan yang terjadi

3. Luwes
4. Mencerminkan pola organisasi
5. Ekonomis
6. Dapat mudah dipahami
7. Dapat segera diadakan perbaikan

Pelaksanaan pengawasan menurut Herujito (2001;243) dengan empat cara yaitu:

1. Mengawasi langsung ditempat
2. Melalui laporan
3. Melalui tulisan
4. Melalui penjagaan khusus.

Menurut Panglaykim (1991;182) untuk dapat melihat atau mengontrol pengawasan ini ada beberapa cara:

1. Mengadakan peninjauan sendiri
2. Laporan secara lisan
3. Laporan secara tertulis.

Tujuan utama dari pengawasan ialah agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Oleh karena itu agar sistem pengawasan benar-benar efektif artinya dapat merealisasikan tujuannya maka suatu sistem pengawasan setidak-tidaknya harus dapat dengan segera melaporkan adanya penyimpangan-penyimpangan dari rencana. (Manulang, 2006:174).

8. Konsep Pengelolaan

a. Pengertian Pengelolaan

Kamus besar bahasa Indonesia (1997) kata pengelolaan berasal dari kata dasar “kelolah” yang artinya mengurus suatu bidang usaha (perusahaan, pertanian, dan sesuatu yang mempunyai tujuan). Sedangkan arti pengelolaan itu sendiri adalah proses, cara perbuatan pengelola; proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain; proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi; proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan.

Balderton (dalam Adisasmita, 2011:22) mengemukakan bahwa istilah pengelolaan sama dengan manajemen yaitu menggerakkan, mengorganisasikan, dalam mengarahkan usaha manusia memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai tujuan.

Harsoyo (1977:121) pengelolaan adalah suatu istilah yang berasal dari kata “kelolah” mengandung arti serangkaian usaha yang bertujuan untuk menggali dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan sebelumnya.

Hamalik (dalam Adisasmita 2011:22) istilah pengelolaan identic dengan istilah manajemen, dimana manajemen itu sendiri merupakan satu proses untuk mencapai tujuan.

Moekijat (dalam Adisasmita 2011:21) mengemukakan bahwa pengelolaan adalah suatu proses tertentu yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, tujuan tertentu dengan cara menggunakan manusia dan sumber-sumber lain.

Menurut Pamudji pengelolaan menitik beratkan pada dua factor penting yaitu:

1. Pengelolaan sebagai pembangunan yang merubah suatu sehingga menjadi baru dan memiliki nilai yang lebih tinggi.
2. Pengelolaan sebagai pembaharuan yaitu usaha untuk memelihara sesuatu agar lrbih cocok dengan kebutuhan.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan adalah sebuah kegiatan merubah suatu sumber daya menjadi lebih bernilai dari sebelumnya melalui proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan agar tercapainya tujuan tertentu.

b. Pengertian Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah merupakan peraaturan daerah Indragiri Hulu nomor 8 tahun 2014 adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan kesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

Pengelolaan sampah adalah pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, pendaur-ulang atau pembuangan material sampah. Kalimat ini biasanya mengacu pada material sampah yang dihasilkan dari kegiatan manusia, dan biasanya dikelola untuk mengurangi dampaknya terhadap kesehatan, lingkungan, dan keindahan. Pengelolaan sampah juga dilakukan untuk memulihkan sumber daya alam. Pengelolaan sampah biasa melibatkan zat padat, cair, gas, atau radio aktif dengan metode dan keahlian khusus untuk masing-masing zat.

Cara-cara pengelolaan sampah:

1. Hog Feeding

Yaitu penggunaan sampah garbage untuk pakan ternak

2. Insenaration (pembakaran)

Yaitu dengan pembuangan sampah di TPA, kemudian dibakar. Pembakaran sampah dilakukan ditempat tertutup dengan mesin dan peralatan khusus yang dirancang untuk pembakaran sampah. System ini memerlukan biaya besar untuk pembangunan, operasional dan pemeliharaan mesin dan peralatan lain.

3. Sanitary Landfill

Yaitu pembuangan sampah dengan cara menimbun sampah dengan tanah yang dilakukan lapis demi lapis, sedemikian rupa sehingga sampah tidak berupa dialam terbuka, jadi tidak sampai menimbulkan bau serta tidak menjadi tempat binatang bersarang. Cara ini tentu sangat bermanfaat jika sekaligus bertujuan untuk meninggikan tanah yang rendah seperti rawa-rawa, genangan air dan sebagainya.

4. Composting (pengomposan)

Merupakan pemanfaatan sampah organik menjadi kompos. Untuk tujuan pengomposan sampah harus dipilah-pilah sehingga sampah organik dan anorganik terpisah.

5. Discharge to Seweres

Disini sampah harus dihaluskan dan kemudian dibuang kedalam saluran pembuangan air bekas. Cara ini dapat dilakukan pada rumah tangga atau dikelola secara terpusat dikota-kota. Cara ini membutuhkan biaya yang besar serta tidak mungkin dilakukan jika sistem pembuangan air kotor tidak baik.

6. Dumping (penumpukan)

Yaitu pembuangan sampah dengan penumpukan diatas tanah terbuka. Dengan cara ini TPA memerlukan tanah yang luas dan sampah ditumpuk begitu saja tanpa adanya perlakuan. Sistem *dumping* memang dapat menekan biaya, tetapi sudah jarang dilakukan karena masyarakat sekitarnya sangat terganggu. Cara ini berpengaruh buruk terhadap lingkungan, berupa sumber penyakit, tempat binatang bersarang.

7. Individual Inceneration

ialah pembakaran sampah yang dilakukan perorangan dirumah tangga. Pembakaran haruslah dilakukan dengan baik, jika tidak asapnya akan mengotori udara serta dapat menimbulkan bahaya kebakaran.

8. Recycling

ialah menghancurkan sampah menjadi jumlah yang lebih kecil dan hasilnya dimanfaatkan misalnya kaleng, kaca dan sebagainya. Cara ini berbahaya untuk kesehatan, terutama jika tidak mengindahkan segi kebersihan.

B. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang meneliti tentang sampah adalah sebagai berikut:

Tabel II.1 : Persamaan dan Perbedaan Penelitian Ini Dengan Penelitian Terdahulu

NO	Nama Peneliti/Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
----	------------------------	---------------------	-----------	-----------

1	Sahnuriana (2016)	Evaluasi Pelaksanaan Tupoksi Dinas Kebersihan dan Pertanaman dalam Pengelolaan sampah di kawasan ratu kemuning Kabupaten Karimun (studi Seksi Kebersihan)	1. Sama-sama meneliti di dinas ligkungan hidup dan kebersihan	1. Lebih spesifik kepada tugas dinas 2. Lokasi Penelitian berbeda
2	Agussalim. KH (2017)	Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Indragiri Hilir Terhadap Pengelolaan Sampah	1. Meneliti tentang sampah 2. Pelaksanaan pengelolaan sampah Dilakukan oleh dinas yang sama	1. Lebih berfokus kepada peranan dinas lingkungan hidup dan kebersihan, sedangkan penelitian ini berfokus kepada penyelenggaraan Pengelolaan sampah
3	Syaiful Bahri (2015)	Strategi pengelolaan sampah oleh dinas Kebersihan Pertanaman dan pemakaman (DKPP) Di Kabupaten Tanggerang	1. Meneliti tentang pengelolaan sampah 2. Pelaksanaan Pengelolaan sampah dilakukan oleh dinas yang sama	1. Lebih berfokus kepada peranan dan strategi dalam pelaksanaan pengelolaan sampah. 2. Lokasi penelitian berbeda
4	Yudi Anugerah Purwadi (2017)	Implementasi Peraturan daerah Indragiri Hilir Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan sampah (studi tentang forum masyarakat peduli sampah)	1. Sama –sama meneliti tentang peraturan daerah Indragiri Hilir nomor 8 tahun 2014 tentang pengelolaan sampah	1. Studi/objek penelitiannya berbeda

Sumber : Olahan Data penelitian, 2020

Berdasarkan tabel diatas Persamaan dan Perbedaan dengan si peneliti adalah perbedaan didalam teori yang digunakan dan sipeneliti menggunakan penggabungan metode kuantitatif dengan kualitati, dan akan hasil penelitian, hal ini bertujuan agar tidak adanya perbedaan dengan sipeneliti, dan memiliki persamaan pada lokasih penelitian.

C. Kerangka Pikiran

Kerangka pikiran ini menggambarkan tentang keterkaitan antara variabel-variabel peneliti dengan indikator-indikator yang mempengaruhi, dilandasi dengan konsep maupun teori-teori yang dianggap relevan yang berguna untuk membangun pemikiran dan konsep dalam menganalisis dan memecahkan permasalahan yang dihadapi sehubungan dengan penelitian ini. Berikut ini adalah gambaran tentang kerangka pikiran Evaluasi Tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Pengangkutan Sampah Di Pasar Kota Rengat :

Gambar II.1 : Kerangka pikiran tentang Evaluasi Tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Pengangkutan Sampah Di Pasar Kota Rengat.



Pengangkutan Sampah Di Pasar Kota

Sumber: modifikasi penelitian 2020

D. Konsep Operasional

Untuk memberi suatu pemahaman agar memudahkan penelitian, maka perlu adanya beberapa batasan penelitian dan fokus penelitian ini yang dioperasionalkan melalui indikaor sebagai berikut.

1. Evaluasi merupakan suatu kegiatan penilaian keberhasilan terhadap hasil kerja yang dicapai.
2. Pemerintah Daerah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu
3. Pengangkutan sampah adalah suatu kegiatan pengangkutan sampah dari tempat atau titik penampungan sampah yang telah ditetapkan untuk dikelola ditempat penampungan akhir Sampah.
4. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat.
5. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu adalah organisasi perangkat Daerah didalam pengangkutan Sampah
6. Ewektifitas dalam tulisan ini adalah berjalannya kebijakan dengan baik sebagaimana mestinya sehingga tidak adanya sampah yang berserakan serta tercapainya tujuan

7. Efisiensi dalam tulisan ini adalah terpenuhinya segala bentuk pelayanan dan pengelolaan terhadap sampah dengan kesediaan sumber daya manusia, waktu, dan sarana dan prasarana yang ada
8. Kecukupan dalam tulisan ini adalah ketersediaan fasilitas seperti truk pengangkutan sampah dan tempat pembuangan sampah sementara
9. Pemerataan dalam tulisan ini adalah pelayanan pengelolaan sampah dilakukan secara merata tidak hanya di jalan-jalan besar tetapi juga sampai dilingkungan perumahan dan merata diseluruh wilayah kecamatan Tembilahan
10. Responsivitas dalam tulisan ini adalah respon atau tanggapan dari Pelaksanaan Kabupaten Indragiri Hulu.
11. Ketepatan dalam tulisan ini adalah pelaksanaan pelayanan pengelolaan sampah menjadi hasil yang berguna dan bernilai

E. Operasional Variabel

Table II.2 : Operasional Variabel penelitian tentang Evaluasi Tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Pengangkutan Sampah Di Pasar Kota Rengat.

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
1	2	3	4
Evaluasi ialah penaksiran (<i>appraisal</i>) pemberian angka (<i>rating</i>) dan penilaian (<i>asement</i>), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan, nilai atau manfaat hasil	Evaluasi Tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Pengangkutan Sampah Di Pasar Kota Rengat	Evektifitas	Penanganan Sampah.
		Efisiensi	Penetapan sosialisasi dan himbauan pembuangan sampah.
		Kecukupan	Evaluasi pencapaian penanganan sampah.

kebijakan. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa kebijakan atau program telah mencapai tingkat kinerja yang bermakna, yang berarti bahwa masalah-masalah kebijakan dibuat jelas dan diatasi (Dunn, 2003 :608)		Perataan	Pemerataan pengangkutan sampah sesuai dengan waktu yang ditentukan.
		Responsivitas	Melakukan penanganan sampah atas keluhan masyarakat.
		Ketepatan	Penanganan sampah tepat sasaran sesuai dengan aturan yang ditetapkan.

Sumber: Data Modifikasi Penelitian, 2020

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini survey deskriptif yaitu tipe penelitian yang menggambarkan mengenai variable yang diteliti dan metode kualitatif yaitu penelitian dalam bentuk persentase dan di akhiri dengan penarikan suatu kesimpulan dalam pemberian saran. Sugiyono (2012;80).

Untuk mengetahui dan melihat serta melukiskan keadaan yang sebenarnya secara rinci dan actual dengan melihat masalah dan tujuan yang telah disampaikan

sebelumnya dengan pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka tipe penelitian ini yang digunakan adalah penelitian survey. Pengertian survey dibatasi dengan penelitian yang datanya dikumpulkan dari informan. Dengan demikian, penelitian survey secara komplit adalah penelitian yang mengambil sampel dari tiap-tiap informan dengan menggunakan wawancara sebagai alat pengumpulan yang pokok. Penelitian ini akan menuntun si peneliti dalam membuat daftar pertanyaan wawancara yang dimaksud di atas untuk disebarkan kepada informan yang sudah ditentukan.

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini adalah di Pasar Kota Rengat Kabupaten Indragiri Hulu. Lokasi ini diambil sebagai lokasi penelitian, karena penulis menemukan fenomena atau indikasi bahwa bahwa Masih banyaknya tumpukan sampah yang ada di pasar Kota Rengat yang tidak terangkut ke tempat pembuangan akhir dan masih kurangnya ketersediaan jumlah alat pengangkutan sampah sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pengelolaan sampah.

C. Key Informan dan Informan

Key informan adalah mereka yang mengetahui dan memiliki informasi pokok yang diperlukan peneliti dan informan adalah mereka yang terlibat langsung dalam intraksi social yang sedang diteliti (Suryanto 2005:171). Adapun key informan penulis adalah Bapak Afrinaldi Eka Putra, S.Sos Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu.

Dalam keterbatasan penulis untuk meneliti seluruh pihak-pihak yang terkait, maka penulis merasa perlu untuk memilih beberapa informan yang penulis pikir cukup relevan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait dengan penelitian ini. Namun pada penelitian ini, jumlah informan tidaklah terbatas pada informan yang akan ditetapkan selanjutnya. Adapun Key Informan dan Informan didalam penelitian ini dapat dilihat sebagaimana table berikut :

Tabel III. 1: Jumlah Key Informan dan Informan

NO	Key Informan	Nama	Jumlah
1	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Peningkatan Kapasitas	Afrinaldi Eka Putra, S.Sos	1 Orang
	Informan		
2	Kepala Seksi Pengelolaan Sampah Dan Pengangkutan	Imron Hidayat, S.Sos.	1 Orang
3	Petugas Sampah	Rinaldi	1 Orang
4	Supir angkutan sampah	Haris	1 Orang
5	Pedagang	Anwar, Sri Hartati,	2 Orang
	Jumlah		5 Orang

Sumber; Olahan Data Penelitian, 2020

Berdasarkan tabel diatas Informan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Kepala Seksi Kebersihan, Petugas Sampah, Sopir angkutan sampah dan Pedagang, Pasar Kota Rengat Kabupaten Indragiri Hulu sebanyak 6 Orang.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh secara langsung dari sumber di lapangan, melalui wawancara terpimpin dengan mengajukan pertanyaan yang meliputi Pengangkutan Sampah Di Pasar Kota Rengat Kabupaten Indragiri Hulu.

2. Data Skunder

Data skunder adalah data atau informasi dan keterangan-keterangan yang diperlukan penelitian untuk menjelaskan permasalahan yang diteliti. Adapun data skunder berupa Undang-Undang, buku-buku, jurnal, laporan penelitian yang telah ada, serta sumber-sumber lain yang dibutuhkan dan berkaitan dengan penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menghimpun data yang diperlukan, maka digunakan tehnik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi

Yaitu Pengumpulan data yang dilakukan dengan melihat dan mengamati secara langsung peristiwa atau kejadian melalui cara yang sistematis. Teknik ini akan membawa peneliti untuk dapat menangkap arti fenomena dari segi pengertian subjek penelitian, dan dapat merasakan apa yang dirasakan serta dihayati oleh subjek penelitian sehingga meyakinkan peneliti bahwa subyek tersebut dapat menjadi sumber data bagi penelitian (Moleong, 2005:174).

2. Wawancara

Adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan terhadap Kepala Seksi Pengelolaan Sampah Dan Pengangkutan, Kapala Seksi Pengelolaan Sampah Dan Pengangkutan, Petugas Sampah, Pedagang, dan Masyarakat penggunaan Pasar (Moleong, 2005:186).

3. Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan pencatatan atau pendokumentasian yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, teknik ini digunakan untuk mendapatkan tentang keadaan lokasi penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Setelah data yang diperoleh dari responden penelitian, lalu diolah untuk selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif, agar gambaran Evaluasi Tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Pengangkutan Sampah Di Pasar Kota Rengat.

G. Jadwal Pelaksanaan Penelitian

Dibawah ini akan dipaparkan mengenai jadwal pelaksanaan penelitian ini dimulai bulan Agustus sampai dengan bulan Desember 2020. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel III.2 : Jadwal Pelaksanaan Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu ke- 2020											
		Agustus				Seotember				Oktober			
1	Persiapan dan Penyusunan UP												
2	Seminar Up												
3	Revisi UP												
4	Penelitian Lapangan												
5	Analisis Data												
6	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian (Skripsi)												
7	Konsultasi												

BAB IV

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

Berdasarkan undang-undang nomor 10 tahun 1948 dibentuk Kabupaten Indragiri yang termasuk didalam provinsi Sumatra Tengah dan Diralisi denan surat keputusan Gubernur Militer Sumatra Tengah pada tanggal 9 November 1948 nomor 10/GM/T.49, kemudian dengan undang-undang nomor 4 tahun 1952 dan undang-undang nomor 12 tahun 1956 dibentuk daerah Otonom dalam Provinsi Sumatra Tengah termasuk Kabupaten Indragiri. Kabupaten Indragiri Hulu pada waktu itu terdiri dari 4 Kewedanaan, 17 Kecamatan yaitu Kewedanaan Indragiri

Berdasarkan undang-undang nomor 10 tahun 1948 dibentuk Kabupaten Indragiri yang termasuk didalam provinsi Sumatra Tengah dan Diralisi denan surat keputusan Gubernur Militer Sumatra Tengah pada tanggal 9 November 1948 nomor 10/GM/T.49, kemudian dengan undang-undang nomor 4 tahun 1952 dan undang-undang nomor 12 tahun 1956 dibentuk daerah Otonom dalam Provinsi Sumatra Tengah termasuk Kabupaten Indragiri. Kabupaten Indragiri Hulu pada waktu itu terdiri dari 4 Kewedanaan, 17 Kecamatan yaitu Kewedanaan Indragiri

Hilir Selatan, Indragiri Hulu Utara, Indragiri Hulu dan Kewedanaan Kuantan Singingi. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 50 tahun 1963 status kewedanaan dihapus bersama dengan penghapusan empat kewedanaan dalam Kabupaten Indragiri.

Dengan undang-undang nomor 61 tahun 1958 Dibentuk Provinsi Riau dengan ibu kota Pekanbaru yang terdiri dari lima daerah tingkat II masing-masing Kabupaten Kampar, Indragiri, Bengkalis, Kabupaten Kepulauan Riau dan Kotamadya Pekanbaru.

Dengan dibentuknya Provinsi Riau dengan undang-undang nomor 61 tahun 1958 maka timbullah dua kewedanaan tersebut yaitu kewedanaan Indragiri Hilir dan Indragiri Hulu. Dengan perjuangan yang disalurkan melalui Panitia Persiapan Pembentukan kabupaten Indragiri Hilir dan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royon Kabupaten Indragiri ternyata hasrat tersebut mendapat dukungan dari DPRD Riau dan DPR pusat.

Penduduk Kabupaten Indragiri Hulu pada berjumlah 353.597 jiwa yang tersebar di 14 kecamatan. Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbesar berada di Kecamatan Rengat sebesar 45.510 jiwa, sedangkan kecamatan yang sedikit jumlah penduduknya ada di Kecamatan Batang Peranap sebanyak 8.817 jiwa. Rata-rata rumah tangga di Kabupaten Indragiri Hulu memiliki anggota keluarga sebanyak 4 orang. Berikut ini adalah batasan-batasan Kabupaten Indragiri Hulu:

- Barat : Kabupaten Kuantan Singingi
- Timor : Kabupaten Indragiri Hilir

- Utara : Kabupaten Pelalawan
- Selatan : Kabupaten Muara Tebo, Provinsi Jambi

B. Visi dan Misi Kabupaten Indragiri Hulu

Adapun visi dan Misi Kabupaten Indragiri Hulu sebagai berikut:

1. Visi

Terwujudnya Kabupaten Indragiri Hulu yang maju, mandiri sejahtera, berbudaya dan agamis.

2. Misi

1. Membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan terampil dan siapmenghadapi tantangan masa depan yang dilandasi oleh kekuatan keimanan danketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esaserta mampu menguasai IPTEK
2. Memelihara nilai-nilai luhur budaya daerah yang berpijak pada nilai-nilaiagama guna menyaring pengaruh budaya lain untuk mempertahankan identitas danintegritas Kabupaten Indragiri Hulu
3. Memberdayakan kekuatan ekonomi yang berbasiskerakyatan melaluipeningkatan kualitas dan kapasitas manajemen, permodalan, produksi danpeningkatan kemampuan dalam mengakses sumber-sumber bahan baku,teknologi, pasar dan faktor lainnya.
4. Mengembangkan industri-industri yang berbasis pertanian (Agroindustri) dengan mengembangkan industri turunan yang berorientasi pada pasar lokal daneksport

5. Membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana infrastruktur yang mampu membuka isolasi daerah, mengembangkan potensi daerah, mengembangkan kawasan-kawasan produktif, meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas faktor-faktor produksi serta membuka peluang pasar.
6. Meningkatkan kinerja pemerintah daerah agar mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dan menjalankan roda pemerintahan yang baik dan benar melalui peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur, penataan kelembagaan pemerintahan daerah serta penataan perangkat hukum dan perundang-undangan

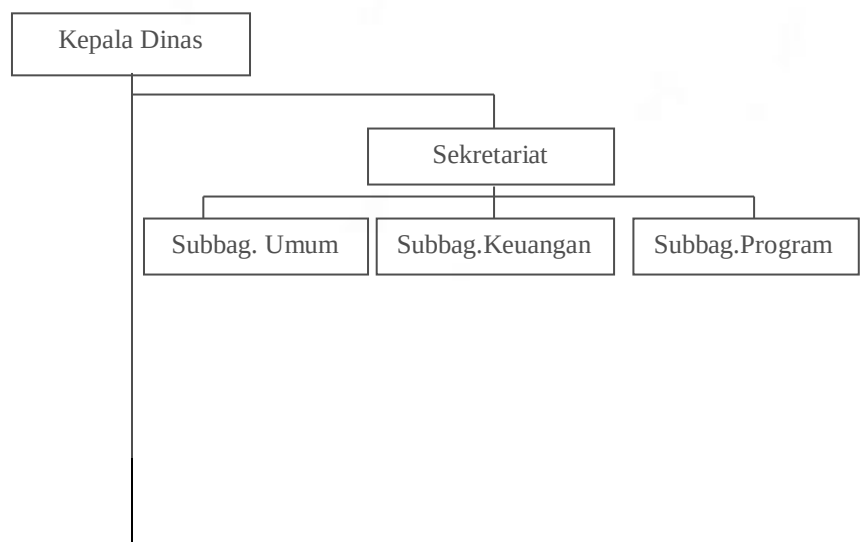
C. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu

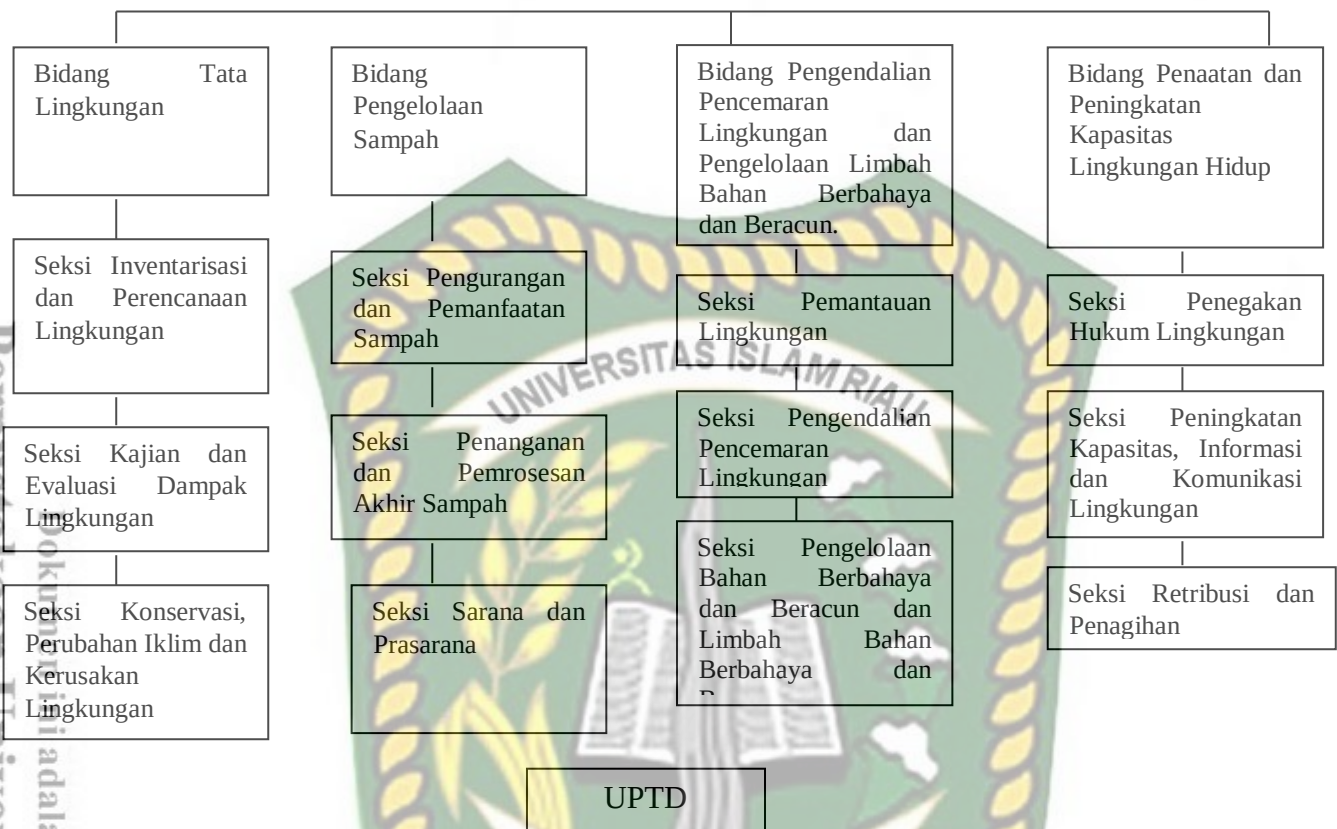
Adapun Tugas Dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu sebagai berikut :

1. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu

Adapun Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu sebagai berikut:

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu





2. Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu terdiri

Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum.
 2. Sub Bagian Keuangan.
 3. Sub Bagian Program.
- c. Bidang Tata Lingkungan, membawahi :
 1. Seksi Inventarisasi dan Perencanaan Lingkungan.

2. Seksi Kajian dan Evaluasi Dampak Lingkungan.
3. Seksi Konservasi, Perubahan Iklim dan Kerusakan Lingkungan.
- d. Bidang Pengelolaan Sampah, membawahi :
 1. Seksi Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah.
 2. Seksi Penanganan dan Pemrosesan Akhir Sampah.
 3. Seksi Sarana dan Prasarana.
- e. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, membawahi :
 1. Seksi Pemantauan Lingkungan.
 2. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan.
 3. Seksi Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- f. Bidang Penuaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, membawahi :
 1. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan.
 2. Seksi Peningkatan Kapasitas, Informasi dan Komunikasi Lingkungan.
 3. Seksi Retribusi dan Penagihan.
- g. Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Informan

Dalam sebuah penelitian, pertanyaan tentang identitas informan penelitian sangatlah penting. Maka dari itu pada hakikatnya dalam sebuah penelitian sangat penting dijelaskan identitas responden penelitian agar pembacanya merasa yakin bahwa penelitian ini adalah hasilnya dapat di pertanggungjawabkan karena penelitian yang jelas pastilah telah sesuai dengan substansi penelitiannya.

Dalam penelitian tentang Evaluasi Tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Pengangkutan Sampah Di Pasar Kota Rengat.

Hal-hal yang akan dijelaskan pada pembahasan ini adalah jenis kelamin, usia, Pendidikan informan.

1. Jenis Kelamin Informan

Dalam penelitian, jenis kelamin informan tidak berpengaruh terhadap hasil penelitian yang dilakukan selama informan tersebut bersedia untuk memberikan jawaban yang memang benar adanya. Tidak berpengaruhnya jenis kelamin informan terhadap hasil penelitian dikarenakan jenis kelamin tidak bias menentukan pola pikir maupun pemahaman seorang terhadap suatu masalah penelitian. Dalam penelitian ini jenis kelamin informan sangatlah didominasi oleh kaum laki-laki, sebanyak 6 orang.

2. Usia Informan

Sebuah penelitian tentunya tidaklah memberikan Batasan usia informan dalam melakukan penelitiannya. Namun hal ini tidak bias di ungkiri bahwa usia merupakan salah satu yang cenderung membentuk kedewasaan pola pikir manusia walaupun kedewasaan pola pikir tidaklah bisa sepenuhnya ditentukan oleh usia seseorang, namun banyak manusia pola pikirnya tergantung usianya.

Pada penelitian ini terdapat keberagaman usia informan mulai dari termuda yaitu, Rinaldi 35 Tahun, Anwar, 37 Tahun, Sri Hartati 39 tahun, Imron Hidayat 43 tahun, Afrinaldi Eka Putra 41 tahun, dan. hal ini dapat diketahui sebagaimana table berikut:

Tabel V.1 Identitas Informan Berdasarkan Umur

No	Tingkat Umur	Frekuensi	Persentase (%)
1	30-35	1	20%
2	36-40	2	20%
3	41-45	2	20%
Jumlah		6	100%

Sumber : Olahan Data Penelitian, 2020

Berdasarkan table di atas diketahui identitas informan berdasarkan umur adalah dari 6 orang dijadikan informan sebanyak 2 orang berusia 30-35 atau 25%, 2 orang berusia 36-40 atau 50%, 1 orang berusia 41-45 atau 1%.

Berdasarkan identitas responden menurut tingkat umur dapat dikatakan bahwa sebagian besar responden yang dijadikan dalam penelitian ini dan informan tergolong usia produktif dan dewasa didalam berpikir dan informan cukup mengetahui pelaksanaan kegiatan dan bentuk pembinaan yang diterima dan dilaksanakan.

3. Pendidikan Informan

Dalam sebuah penelitian jawaban yang diberikan oleh informan dalam menjawab semua pertanyaan penelitian merupakan data yang harus dianalisis. Hal ini dikarenakan bahwa jawaban setiap informan tentunya berbeda satu dengan yang lainnya, hal ini dikarenakan dipengaruhi oleh pemahaman terhadap masalah penelitian dan tidak akan pernah terlepas dari tingkat Pendidikan yang pernah dilalui.

Biasanya pemahaman seseorang yang memiliki Pendidikan yang lebih tinggi akan lebih baik dari pada seorang yang tingkat pendidikannya lebih rendah. Dalam penelitian ini tingkat Pendidikan informan cukup variative mulai dari

jenjang Pendidikan Diploma 3 sebanyak 1 orang, tingkat Pendidikan Sarjana sebanyak 2 orang, dan tingkat Pendidikan Pascasarjana sebanyak 1 orang. Adapun tingkat Pendidikan informan secara jelas dapat dilihat pada table berikut :

Tabel V.2 Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan.

No	Nama	Jabatan	Tingkat Pendidikan
1	Afrinaldi Eka Putra, S.Sos	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Peningkatan Kapasitas	S1
2	Imron Hidayat, S.Sos	Kepala Seksi Pengelolaan Sampah Dan Pengangkutan	S1
3	Rinaldi	Petugas Sampah	SMA
4	Haris	Supir angkutan sampah	SMA
5	Suhartati,	Pedagang	SMA
6	Anwar	Pedagang	SMA

Sumber : *Oalahan Data Penelitian, 2021*

Berdasarkan table diatas Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan dimana diketahui jumlah tingkat Pendidikan S1 sebanyak 2 Orang, Pendidikan SMA sebanyak 4 orang.

Didalam observasi yang peneliti lakukan dilapangan bahwa Evaluasi Tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Pengangkutan Sampah Di Pasar Kota Rengat belum terlaksana sesuai dengan peraturan dan tugas dan fungsi didalam penanganan sampah mulai dari waktu kegiatan pengangkutan, penyediaan mobil operasional dan penyediaan penampungan sampah masyarakat.

Dalam pelaksanaan penyebaran wawancara yang sudah disajikan kepada Key informan dan informan, maka langkah awal yang harus dipenuhi adalah berupa identitas Key informan dan informan dan yang dijadikan Key informan

dan informan pada penelitian ini memiliki tingkat pendidikan yang berbeda dan diskriminasi oleh pegawai yang disajikan sebagai Key informan dan informan dalam penelitian ini. Adapun dinilai bahwa tingkat pendidikan ini dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini adalah pada tingka analisis yang akan diberikan dalam menilai.

B. Evaluasi Tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Pengangkutan Sampah Di Pasar Kota Rengat

Pengangkutan sampah dimulai dari penyediaan tempat penampungan sampah sementara di pasar Rengat dan dilakukan pengakutan sampah dengan armada angkutan sampah yaitu mobil colt diesel di setiap harinya dan hasil pengangkutan sampah dari Pasar Rengat di tumpukkan kemabali di tempat penampungan akhir sampah unuk diproses

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 58 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu diatas dalam pengakutan sampah dilaksan oleh Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Peningkatan Kapasitas dengan membawahi secara khusus pelaksana dilapangan dalam pengakutan sampah dimana dikatakan pada pasal 13 Seksi Pengelolaan Sampah Dan Pengangkutan adalah pelaksana secara langsung pengakutan sampah dilapangan. Adapun tugas Seksi Pengelolaan Sampah Dan Pengangkutan pada pasal 13 point J antara lain mengkoordinasikan, memilah, mengumpulkan, mengangkut, dan memproses akhir sampah.

Salah satu tugas yang diemban oleh Seksi Pengelolaan Sampah Dan Pengangkutan adalah mengkoordinasikan, memilah, mengumpulkan, mengangkut, dan memproses akhir sampah tentunya hal ini bertujuan agar sampah yang ada dipasar Rengat dapat di angkut tanpa menimbulkan penumpukan.

Pasar Kota Rengat merupakan salah satu pasar tradisional yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu. Pasar ini terletak di jalan Agus Salim Desa Sekip Hulu Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu. Selain itu juga pasar ini memiliki luas tanah seluas 9.597 m² dengan luas bangunan ±6.000 m² dan memiliki 3 lantai. Pasar Kota Rengat juga merupakan salah satu pasar penghasil sampah yang cukup besar dengan volume sampah di pasar Kota Rengat perharinya adalah 42,7 m³ sehingga hal ini sangat dibutuhkan penanganan yang cukup baik dalam hal penanganan sampah.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu hanya memiliki 8 mobil dump truck pengangkut sampah di Kabupaten Indragiri Hulu. Hal ini sangat minim dibandingkan luasnya wilayah kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu. Selain itu, pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu mengalami kekurangan petugas pengangkut sampah dan bahwa jumlah petugas pengangkut sampah di Kabupaten Indragiri Hulu ada sebanyak 5 orang. Hal ini sangat tidak efektif. Oleh karena itulah pelaksanaan tugas pengangkutan sampah belum terlaksana dengan maksimal, hal ini dilihat masih banyaknya tumpukantumpukan sampah terutama di Pasar Kota Rengat sehingga sering kali menimbulkan bau busuk yang sangat mengganggu para pengunjung pasar.

Adapun berikut teori yang digunakan didalam penelitian ini adalah konsep Evaluasi dimana dikatakan teori (Dunn, 2003;608) meliputi :

- a. Efektivitas
- b. Efisiensi
- c. Kecukupan
- d. Perataan
- e. Responsivitas
- f. Ketepatan

Berikut dijelaskan hasil tanggapan informan terhadap Indikator-indikator penelitian. Dalam penelitian ini bahwa peneliti telah melaksanakan wawancara kepada 5 orang yang telah ditetapkan melalui pertanyaan yang diberikan kepada informan semuanya sama sesuai dengan judul penelitian, Adapun Analisa peneliti berdasarkan indikator sebagai berikut :

1. Efektivitas

Efektivitas merupakan pencapaian tujuan secara tepat dengan tujuan-tujuan yang tepat dan arah kebijakan yang dibuat yang sesuai dengan tujuan dan fungsinya. Kegiatan penagan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu di Pasar Rengat dengan melakukan pengangkutan sampah di setiap harinya hall ini dilakukan agar sampah tidak berserakan di lingkungan pasar sehingga pasar terlihat rapi dan bersih sehingga aktifitas pasar dapat berlangsung dengan baik.

• Penanganan Sampah

Penanganan Sampah adalah efektivitas dan upaya yang dilakukan tepat sasaran sesuai dengan waktu kegiatan pengangkutan sampah yang ditetapkan disetiap harinya dikarenakan pasar rengat ditemui sampah yang banyak disetiap harinya dikarenakan kegiatan penjualan dari berbagai bahan makanan dan

berbagai dagang yang membuang sisa jualan di sekitar pasar sehingga Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu sangat diperlukan didalam penanganan penumpukan sampah dan pengangkutan sampah di setiap hari kerja.

Adapun wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Peningkatan Kapasitas bapak Afrinaldi Eka Putra, S.Sos sebagai berikut:

Sejauh ini kami melakukan pengangkutan sampah di pasar Rengat disetiap hari kerja tentunya pengangkutan dilakukan disetiap hari agar sampah tidak menumpuk dikarenakan pasar rengat sangat banyak sampah dikarenakan aktifitas berjualan, tentunya hal ini kami sangat perhatikan sehingga kegiatan berjualan dan kenyamanan para pedagang dan pembeli dapat merasa nyaman, namun kegiatan pengangkutan sampah masih ada kendala yaitu kadang tidak disetiap harinya dilakukan pengangkutan apabila mobil operasional rusak tapi itu jarang terjadi dan sebisa kami selalu berusaha dalam pengangkutannya. (Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Peningkatan Kapasitas bapak Afrinaldi Eka Putra, S.Sos, hari Senin pada tanggal 8 Februari Tahun 2021, Pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu suda melakukan pengangkutan sampah di pasar Rengat disetiap hari kerja tentunya pengangkutan dilakukan disetiap hari agar sampah tidak menumpuk dikarenakan pasar rengat sangat banyak sampah dikarenakan aktifitas berjualan namun masih ada menjadi kendala apabila mobil operasiaonal bermasalah barulah pengangkutan ditunda di hari berikutnya.

Begitu juga hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pengelolaan Sampah Dan Pengangkutan Bapak Imron Hidayat, S.Sos sebagai berikut :

Pengangkutan sampah sudah kita lakukan disetiap hari kerja di pasar Regat dengan tujuan agar tidak terjadinya penumpukan sampah karena pasar rengat termasuk penumpukan sampah yang sangat cepat dikarenakan kegiatan berdagang pengangkutan kamilakukan sore hari selesai kegiatan berdagang, dalam penagkutan sampah masih adalah masalah biasaya penagkutan dilakukan di hari berikutnya karena angkutan operasional sampah yang rusak dan petugas sampah yang kurang mungkin sakit atau berhalangan namun kami selalu tidak membiarkan sampah bertumpuk

berhari-hari selalu kami usahakan jagan sampai bertumpuk. (Kepala Seksi Pengelolaan Sampah Dan Pengangkutan Bapak Imron Hidayat, S.Sos, hari Senin pada tanggal 8 Februari Tahun 2021, Pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa kegiatan Pengangkutan sampah sudah kita lakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu disetiap hari kerja di pasar Regat dengan tujuan agar tidak terjadinya penumpukan sampah pengangkutan dilakukan sore hari selesai kegiatan berdagang, namun pengangkutan sampah terkadang dilakukan setelah 2 hari karena angkutan operasional sampah yang rusak dan petugas sampah yang kurang mungkin sakit atau berhalangan.

Begitu juga pendapat petugas pengangkutan sampah di pasar rengat bapak Rinaldi sebagai berikut:

Sejauh ini kami sebagai petugas lapangan pengangkutan sampah sudah melakukan pengangkutan sampah disetiap harinya sehingga sampah yang ada tidak sampai bertumpuk dikarenakan seperti biasa 1 hari saja bak sampah suda penuh kalau tidak diangkut berserakan, kegiatan pengangkutan sampah terkadang ada bolong bolongnya hal ini biasanya disebabkan angkutan operasional yang rusak sehingga menunggu hari berikutnya. (petugas pengangkutan sampah di pasar rengat bapak Rinaldi, hari Selasa pada tanggal 9 Februari Tahun 2021, Pukul 15.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa petugas pengangkutan sampah melakukan pengangkutan sampah disetiap harinya sehingga sampah yang ada tidak sampai bertumpuk dikarenakan 1 hari saja bak sampah suda penuh kalau tidak diangkut berserakan, kegiatan pengangkutan belum dilakukan disetiap harinya dikarenakan terkadang angkutan operasional yang rusak sehingga menunggu diperbaiki.

Begitu juga pendapat supir angkutan sampah di pasar rengat bapak Haris sebagai berikut:

Sejauh ini saya membawa angkutan sampah belum memberikan maksimal dalam pengangkutan sampah di pasar rengat karena bukan hanya sampah pasar rengat yang diangkut namun sampah masyarakat lainnya dan terakhir pasar rengat sehingga terkadang sampah uda menumpuk nah sampah pasar rengat kami angkut besoknya lagi begitulah setiap harinya. (supir angkutan sampah di pasar rengat bapak Haris, hari Selasa pada tanggal 9 Februari Tahun 2021, Pukul 13.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa sopir angkutan sampah dalam membawa angkutan sampah belum maksimal dalam pengangkutan sampah di pasar rengat karena bukan hanya sampah pasar rengat yang diangkut namun sampah masyarakat lainnya dan terakhir pasar rengat.

Begitu juga hasil wawancara dengan Pedagang Pasar rengat Bapak Anwar sebagai berikut:

Sejauh ni petugas sampah sudah melakukan pengkutan sampah namun saya perhatikan belum disetiap harinya sehingga penampungan sampah terkadang penuh dan sampai berserakan dikarenakan banyaknya sampah disetiap harinya namun kalua sampah dilokasih penjualan sudah bersilah yang maslah penumpukan sampah dibaknya yang sering berserakan karena lama diangkut. (Pedagang Pasar rengat Bapak Anwar, Rabu pada tanggal 10 Februari Tahun 2021, Pukul 11.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa kegiatan petugas sampah sudah melakukan pengkutan sampah namun belum disetiap harinya sehingga sampah bertumpuk dan berserakan dikarenakan banyaknya sampah disetiap harinya sehingga kalua tidak diangkut disetiap harinya akan bertumpuk dan bau yang tidak sedap.

Begitu juga hasil wawancara dengan Pedagang Pasar rengat Ibu Sri Hartati sebagai berikut:

Kalau saya perhatikan pengkutan sampah tidak dilakukan disetiap harinya hal ini terlihat terkadang sampah yang sebelumnya masih disitu bertumpuk sehingga sampah semakin banyak dan berserakan ya mungkin sekali 2 hari kali pengkutannya ya kalua begini sampahnya semakin banyak dan

bertumpuk seharusnya diangkut disetiap hari agar sampah tidak bertumpuk dan berserakan. (Pedagang Pasar rengat Ibu Sri Hartati, Rabu pada tanggal 10 Februari Tahun 2021, Pukul 12.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa pengkutan sampah tidak dilakukan disetiap harinya hal ini terlihat sampah yang sebelumnya masih disitu bertumpuk sehingga sampah semakin banyak dan berserakan seharusnya diangkut disetiap hari agar sampah tidak bertumpuk dan berserakan.

Hasil observasi penelitian bahwa efektivitas Penanganan Sampah yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu bahwanya belum berlangsung dengan maksimal dimana pengakutan sampah belum dilakukan disetiap harinya terkadang sampai dengan 2 hari pengakutan sehingga sampah yang masih bertumpuk dan berserakan dikarenakan banyaknya sampah yang ada.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi bahwa penangan sampah yang dilakuakn Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu belum terlaksana dengan maksimal dimana sampah di pasar rengat masih bertumpuk dan belum diklakukan disetiap hari kerja hal ini dikarenakan mobil angkutan operasional sampah yang terkadang megalami kendala kerusakan sehingga terkendalanya pengakutan sampah disetiap harinya sehingga harus menunggu hari berikutnya.

2. Efesiensi

Efesiensi dalam tulisan ini adalah yaitu berapa usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang yang diinginkan dalam penaganan sampah dengan kesediaan sumber daya manusia, yang ada. Kegiatan penagan sampah yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu dengan

memberikan sosialisasi dan himbauan terhadap pengguna pasar rengat dalam pembuangan sampah agar sampah tidak berserakan dan dibuat pada tempat yang telah tersedia.

- Penetapan sosialisasi dan himbauan pembuangan sampah

Penetapan sosialisasi dan himbauan pembuangan sampah adalah upaya yang dilakuakn Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu dalam penanganan sampah dengan tujuan agar sampah dibuang pada tempat yang telah disediakan. Adapun berikut wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Peningkatan Kapasitas bapak Afrinaldi Eka Putra, S.Sos sebagai berikut:

Penagan sampah di pasar rengat kami sudah memberikan sosialisasi dan himbauan bagi para pengguna pasar trengat terutama bagi para pedagang agar tidak melakukan pembunagan sampah dengan sembarangan melainkan pada tempat yang telah disedikan dengan tujuan agar pengguna pasar mengetahui adanya aturan pembunagan sampah. (Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Peningkatan Kapasitas bapak Afrinaldi Eka Putra, S.Sos, hari Senin pada tanggal 8 Februari Tahun 2021, Pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu suda melakukan Penagan sampah di pasar rengat dengan memberikan sosialisasi dan himbauan bagi para pengguna pasar rengat terutama bagi para pedagang agar tidak melakukan pembuangan sampah dengan sembarangan melainkan pada tempat yang telah disedikan dengan tujuan agar pengguna pasar mengetahui adanya aturan pembunagan sampah.

Begitu juga hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pengelolaan Sampah

Dan Pengangkutan Bapak Imron Hidayat, S.Sos sebagai berikut :

Sejauh ini kami suda memberikan sosialisasi terhada para pedagang melalui baliho di sekitar pasar tentang perlunya taat akan pembungan sampah sehingga tidak membuang sampah dengan sembarangn, namun

masih banyak pedagang yang bebal dengan membuang sampah di sekitar area pasar buakan tempat sampah sehingga sampah berserakan. (Kepala Seksi Pengelolaan Sampah Dan Pengangkutan Bapak Imron Hidayat, S.Sos, hari Senin pada tanggal 8 Februari Tahun 2021, Pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu sudah memberikan sosialisasi terhadap para pedagang melalui baliho di sekitar pasar tentang perlunya taat akan pembuangan sampah sehingga tidak membuang sampah dengan sembarangan, namun masih banyak pedagang yang membuang sampah di sekitar area pasar buakan tempat sampah sehingga sampah berserakan.

Begitu juga pendapat petugas pengangkutan sampah di pasar rengat bapak Rinaldi sebagai berikut:

Sejauh ini pemberian himbauan dan sosialisasi pembuangan sampah pada tempatnya yang diberikan terhadap pengguna pasar terutama para pedagang sudah dilakukan namun kegiatan tersebut dilakukan dulu tahun sebelumnya sehingga masih banyak pedagang yang tidak tau dikarenakan pedagang yang berganti ganti sehingga sampah dibuang begitu saja di area berdagangan mereka nah inilah salah satunya yang menimbulkan sampah berserakan. (petugas pengangkutan sampah di pasar rengat bapak Rinaldi, hari Selasa pada tanggal 9 Februari Tahun 2021, Pukul 15.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu melakukan himbauan dan sosialisasi pembuangan sampah pada tempatnya yang diberikan terhadap pengguna pasar terutama para pedagang sudah namun kegiatan tersebut tidak disetiap tahunnya atau baliho disetiap sudut pasar sehingga masih banyak pedagang yang tidak tau dikarenakan pedagang yang berganti ganti.

Begitu juga pendapat supir angkutan sampah di pasar rengat bapak Haris sebagai berikut:

Sejauh ini himbauan sosialisasi terkait penanganan sampah hanya sebatas arahan saja namun tidak adanya ketegasan oleh pihak Dinas dan kami juga mengangkut sampah semana semampu kami saja karena hanya 1 angkutan saja yang beroperasi. (supir angkutan sampah di pasar rengat bapak Haris, hari Selasa pada tanggal 9 Februari Tahun 2021, Pukul 13.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa sopir angkutan sampah dalam himbauan sosialisasi terkait penanganan sampah hanya sebatas arahan saja namun tidak adanya ketegasan oleh pihak Dinas dan kami juga mengangkut sampah semana semampu kami saja karena hanya 1 angkutan saja yang beroperasi.

Begitu juga hasil wawancara dengan Pedagang Pasar rengat Bapak Anwar sebagai berikut:

Sejauh ni himbauan dan sosialisia yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu kayaknya belum adalah saya sudah 5 tahun disini berjualan melainkan hanya baliho saja itupun dulu balihonya natah sudah kemana sehingga banyak pengguna pasar khususnya pedagan tidak mengetahui akan pembuangan sampah yang harus ditumpuk dan dibuang pada tempatnya, melainkan pedagang rata-rata membuang sampah pada daerah berjualannya sehingga menimbulkan sampah yang berserakan. (Pedagang Pasar rengat Bapak Anwar, Rabu pada tanggal 10 Februari Tahun 2021, Pukul 11.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu dalam himbauan dan sosialisia yang dalam penagan sampah belum dilkukan disetiap tahunnya melainkan hanya baliho saja itupun dulu balihonya sehingga banyak pengguna pasar khususnya pedagan tidak mengetahui akan pembuangan sampah yang harus ditumpuk dan dibuang pada tempatnya, melainkan pedagang rata-rata membuang sampah pada daerah berjualannya sehingga menimbulkan sampah yang berserakan.

Begitu juga hasil wawancara dengan Pedagang Pasar rengat Ibu Sri Hartati sebagai berikut:

Sejauh ini tidak ada sosialisasi yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu saya disini berjualan sudah 1 tahun namun belum adanya himbauan melainkan adanya baliho tentang penertiban pembuangan sampah itupun balihonya kecil dan hanya 1 pada lokasi bak sampah ya manalah semua pedagang tau. Ya pedagang tau hanya jualan kalua sampah kan ada petugas pasar kan kita bayar uang kebersihan. (Pedagang Pasar rengat Ibu Sri Hartati, Rabu pada tanggal 10 Februari Tahun 2021, Pukul 12.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa tidak ada sosialisasi yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu melainkan hanya adanya baliho 1 buah tentang penertiban pembuangan sampah di area penampungan sampah.

Hasil observasi penelitian bahwa efisiensi dalam penanganan sampah yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu melalui sosialisasi dan himbauan belum diterapkan melainkan hanya baliho pemberitahuan pertiban pembuangan sampah pada area bak penampungan sampah sehingga sebagian pengguna pasar khususnya penjualan tidak mengetahui adanya tat tertib pembuangan sampah.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi bahwa Penetapan sosialisasi dan himbauan pembuangan sampah yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu belum optimal dilakukan melainkan hanya sebatas himbauan melalui baliho yang dipajang di tempat penampungan sampah sehingga banyak pedagang pasar yang belum diberikan arahan terkait penertiban akan pembuangan sampah sehingga masih ditemui di area pedagang sampah yang berserakan.

3. Kecukupan

Kecukupan yaitu seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah. Pencapaian penanganan pengangkutan sampah di pasar rengat oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu dengan melakukan evaluasi pencapaian kerja dalam penanganan sampah dan waktu kegiatan pengangkutan sampah serta prasarana yang mendukung dalam pencapaian pengangkutan sampah.

- Evaluasi pencapaian penanganan sampah

Evaluasi pencapaian penanganan sampah adalah upaya yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu dalam memperbaiki hasil kinerja petugas dalam pengangkutan sampah dan solusi dari hambatan yang ditemui di lapangan. Adapun berikut wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Peningkatan Kapasitas bapak Afrinaldi Eka Putra, S.Sos sebagai berikut:

Sejauh ini kami sudah melakukan upaya dalam menanggulangi hambatan dalam pencapaian pengangkutan sampah di pasar rengat dengan melakukan evaluasi terkait hambatan dalam pelaksanaan pengangkutan sampah dan memberikan solusi atas keluhan yang dirasakan pengguna pasar rengat. (Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Peningkatan Kapasitas bapak Afrinaldi Eka Putra, S.Sos, hari Senin pada tanggal 8 Februari Tahun 2021, Pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu sudah melakukan upaya dalam menanggulangi hambatan dalam pencapaian pengangkutan sampah di pasar rengat dengan melakukan evaluasi terkait hambatan dalam pelaksanaan pengangkutan sampah dan memberikan solusi atas keluhan yang dirasakan pengguna pasar rengat.

Begitu juga hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pengelolaan Sampah

Dan Pengangkutan Bapak Imron Hidayat, S.Sos sebagai berikut :

Kami sudah melakukan upaya penagan hambatan dan kendala dilapangan dalam melakukan pengakutan sampah dengan melakukan evaluasi pencapaian yang akan diperbaharui sehingga penagan sampah dapat dilakukan dengan maksimal, ya sejauh ini yang menjadi masalah hanya pada angkutan operasional saja sehingga mengurangi kegiatan kerja. (Kepala Seksi Pengelolaan Sampah Dan Pengangkutan Bapak Imron Hidayat, S.Sos, hari Senin pada tanggal 8 Februari Tahun 2021, Pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu sudah melakukan upaya penagan hambatan dan kendala dilapangan dalam melakukan pengakutan sampah dengan melakukan evaluasi pencapaian yang akan diperbaharui sehingga penagan sampah dapat dilakukan dengan maksimal, ya sejauh ini yang menjadi masalah hanya pada angkutan operasional saja sehingga mengurangi kegiatan kerja.

Begitu juga pendapat petugas pengakutan sampah di pasar rengat bapak Rinaldi sebagai berikut:

Sejauh ini upaya perbaikan hasil pennagan sampah melalui evaluasi kayaknya belum dietrapkan apa yang menjadi evaluasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu hal ini terbukti bahwa sampai sekarang angkutan sampah yang sering rusak dan masih kurang selayknya suda ada 2 dan bisa dipakai bergantian. Namun kenyataannya sama aja belum ada perubahan sehingga pencapaian penagkutan sampa lamban. (petugas pengakutan sampah di pasar rengat bapak Rinaldi, hari Selasa pada tanggal 9 Februari Tahun 2021, Pukul 15.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu bahwa upaya perbaikan hasil penaganan sampah melalui hasil evaluasi belum dietrapkan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu hal ini terbukti bahwa sampai sekarang angkutan

sampah yang sering rusak dan masih kurang selayaknya suda ada 2 dan bisa dipakai bergantian. Namun kenyataannya sama aja belum ada perubahan sehingga pencapaian penagkutan sampa lamban.

Begitu juga pendapat supir angkutan sampah di pasar rengat bapak Haris sebagai berikut:

Sejauh ini penyediaan angkutan sampah sebanyak 2 uit truk namun yang kepakai hanya 1 truk nah inilah yang membuat lama dalam pengangkutan sampah dan tidak dapat diangkut langsung secara keseluruhan. (supir angkutan sampah di pasar rengat bapak Haris, hari Selasa pada tanggal 9 Februari Tahun 2021, Pukul 13.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa penyediaan angkutan sampah sebanyak 2 uit truk namun yang kepakai hanya 1 truk nah inilah yang membuat lama dalam pengangkutan sampah dan tidak dapat diangkut langsung secara keseluruhan.

Begitu juga hasil wawancara dengan Pedagang Pasar rengat Bapak Anwar sebagai berikut:

Sejauh ni belum ada saya rasakan perubahan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu terbukti pengkutan sampah belum dilakukan disetiap hari dan saya dengar-dengar mobil angkutan yang masih kurang dan sering rusak sehingga mempengaruhi pencapaian pengkutan sampah. (Pedagang Pasar rengat Bapak Anwar, Rabu pada tanggal 10 Februari Tahun 2021, Pukul 11.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu memberikan perubahan terbukti pengkutan sampah belum dilakukan disetiap hari dan dikarenakan mobil angkutan yang masih kurang dan sering rusak sehingga mempengaruhi pencapaian pengkutan sampah.

Begitu juga hasil wawancara dengan Pedagang Pasar rengat Ibu Sri Hartati sebagai berikut:

Saya rasa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu belum melakukan evaluasi akan hambatan dalam penagkutan sampah terbukti sampah masih bertumpuk belum diangkut terkadang sampai 2 hari sehingga mengeluarkan bau yang tidak sedap dan sampah masih berserakan. (Pedagang Pasar rengat Ibu Sri Hartati, Rabu pada tanggal 10 Februari Tahun 2021, Pukul 12.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa tidak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu belum melakukan evaluasi akan hambatan dalam penagkutan sampah terbukti sampah masih bertumpuk belum diangkut terkadang sampai 2 hari sehingga mengeluarkan bau yang tidak sedap dan sampah masih berserakan.

Hasil observasi penelitian bahwa pencapaian dalam pengkutan sampah dipasar rengat melalui evaluasi pencapaian penanganan sampah belum dilakukan hal ini terlihat bahwa belum adanya perubahan akan penagan sampah hal ini sampah yang bertumpuk belum diangkat disetiap harinya sehingga memberikan bau dan pandangan yang tidak nyaman dikarenakan sampah yang ditemui berserakan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi diketahui bahwa pencapaian dalam pengkutan sampah dipasar rengat melalui evaluasi pencapaian penanganan sampah belum dilakukan hal ini bahwa kegiatan pengakutan sampah belum dilakukan disetiap hari melainkan sampai dengan 2 hari hal ini sehingga belum adanya perubahan yang dilakukan atas hambatan dan keluhan masyarakat pengguna pasar terutama pedangan Pasar Rengat.

4. Perataan

Perataan merupakan pemberian pencapaian hasil kebijakan terhadap organisasi maupun lingkungan secara menyeluru berdasarkan tugas dan fungsinya. Perataan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu dalam pengkutan sampah dengan penetapan waktu pengakutan sampah disetiap hari kerja.

- Pemerataan pengangkutan sampah sesuai dengan waktu yang ditentukan

Pemerataan pengangkutan sampah sesuai dengan waktu yang ditentukan adalah penetapan pengakutan sampah yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu di setiap hari kerja melauai penyediaan bak sampah yang telah disediakan. Adapun berikut wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Peningkatan Kapasitas bapak Afrinaldi Eka Putra, S.Sos sebagai berikut:

Pemerataan pengakutan sampah berdasarkan waktu kegiatan sampah dari bak sampah yang telah kami sediakan dimana pengakutan sampah kami lakukan di setiap hari kerja sehingga sampah tidak sampai bertumpuk dahulu. (Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Peningkatan Kapasitas bapak Afrinaldi Eka Putra, S.Sos, hari Senin pada tanggal 8 Februari Tahun 2021, Pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu sudah melakukan Pemerataan pengakutan sampah berdasarkan waktu kegiatan sampah dari bak sampah yang telah tersedia dimana pengakutan sampah dilakukan di setiap hari kerja sehingga sampah tidak sampai bertumpuk dahulu.

Begitu juga hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pengelolaan Sampah Dan Pengangkutan Bapak Imron Hidayat, S.Sos sebagai berikut :

Sejauh ini kegiatan pemerataan penagan sampah di pasar rengat dengan pengkutan sampah berdasarkan ketetapan pengkutan yang dilakukan di setiap hari kerja guna menghindari terjadinya penumpukan sampah. (Kepala Seksi Pengelolaan Sampah Dan Pengangkutan Bapak Imron Hidayat, S.Sos, hari Senin pada tanggal 8 Februari Tahun 2021, Pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu sudah melakukan kegiatan pemerataan penagan sampah di pasar rengat dengan pengkutan sampah berdasarkan ketetapan pengkutan yang dilakukan di setiap hari kerja guna menghindari terjadinya penumpukan sampah.

Begitu juga pendapat petugas pengangkutan sampah di pasar rengat bapak Rinaldi sebagai berikut:

Sejauh ini kegiatan pengangkutan sampah belum dilakukan secara merata berdasarkan waktu yang ditetapkan melainkan berdasarkan angkutan operasional apabila bagus ya kami bekerja kalau tidak kami harus menunggu lama selayaknya mobil angkutan sampah dapat diganti atau ditambahin sehingga kami dapat bekerja dengan maksimal. (petugas pengangkutan sampah di pasar rengat bapak Rinaldi, hari Selasa pada tanggal 9 Februari Tahun 2021, Pukul 15.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa petugas sampah dalam kegiatan pengangkutan sampah belum dilakukan secara merata berdasarkan waktu yang ditetapkan melainkan berdasarkan angkutan operasional yang tersedia dan layak digunakan apabila bagus baru bekerja kalau tidak harus menunggu lama selayaknya mobil angkutan sampah dapat diganti atau ditambahin sehingga kami dapat bekerja dengan maksimal.

Begitu juga hasil wawancara dengan Pedagang Pasar rengat Bapak Anwar sebagai berikut:

Sejauh ni pemerataan angkutan sampah belum terealisasi sesuai dengan waktu yang ditetapkan melainkan dilakukan kebanyakan 2 hari sekali baru diangkut sehingga sampah bertumpuk dan berserakan. (Pedagang Pasar rengat Bapak Anwar, Rabu pada tanggal 10 Februari Tahun 2021, Pukul 11.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa pemerataan angkutan sampah belum terealisasi sesuai dengan waktu yang ditetapkan melainkan dilakukan kebanyakan 2 hari sekali baru diangkut sehingga sampah bertumpuk dan berserakan.

Begitu juga pendapat supir angkutan sampah di pasar rengat bapak Haris sebagai berikut:

Sejauh ini pengkutan sampah dipasar rengat rata-rata seminggu 2 atau 3 kali karena kami harus mengangkut sampah lainnya di pemukiman warga. (supir angkutan sampah di pasar rengat bapak Haris, hari Selasa pada tanggal 9 Februari Tahun 2021, Pukul 13.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan pengkutan sampah dipasar rengat rata-rata seminggu 2 atau 3 kali karena kami harus mengangkut sampah lainnya di pemukiman warga.

Begitu juga hasil wawancara dengan Pedagang Pasar rengat Ibu Sri Hartati sebagai berikut:

Belum adanya pemerataan pengangkutan sampah sesuai dengan ketentuan aturan pengangkutan sampah di setiap hari kerja melainkan dilakukan sampai 2 hari pengangkutan sampah sehingga sampah bertumpuk dan mengeluarkan bau yang tidak sedap. (Pedagang Pasar rengat Ibu Sri Hartati, Rabu pada tanggal 10 Februari Tahun 2021, Pukul 12.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa belum adanya pemerataan pengangkutan sampah sesuai dengan ketentuan aturan pengangkutan sampah di setiap hari kerja melainkan dilakukan sampai 2 hari pengangkutan sampah sehingga sampah bertumpuk dan mengeluarkan bau yang tidak sedap.

Hasil observasi penelitian bahwa pemerataan pengangkutan sampah berdasarkan ketetapan pengangkutan sampah di Setiap hari kerja belum terlaksana sehingga terjadi dilapngan dilakukan hanya 2 hari sekali sehingga sampah bertumpuk dan berserakan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi diketahui bahwa pemerataan pengangkutan sampah sesuai dengan waktu yang ditetapkan belum terealisasi hal ini pengangkutan sampah dilakukan 2 hari sekali sehingga terjadinya penumpukan sampah di bak yang telah disediakan.

5. Responsivitas

Responsivitas, adalah apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, profesi, dan nilai kelompok-kelompok tertentu. Penanganan sampah tidak terlepas dari himbauan atas keluhan pengguna pasar rengat yang dirasakan bahwa penanganan pengangkutan sampah belum maksimal sehingga perlunya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu menanggapi keluhan pengguna pasar sehingga mengetahui tindakan yang akan dilakukan.

• Melakukan Penanganan Sampah Atas Keluhan Masyarakat

Melakukan penanganan sampah atas keluhan masyarakat adalah tindakan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu terhadap keluhan atau masukan yang dirasakan pengguna pasar rengat tentunya hal ini bertujuan agar pengangkutan sampah dapat dilakukan dengan masimal sehingga tidak mengganggu aktifitas pasar. Adapun berikut wawancara dengan Kepala

Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Peningkatan Kapasitas bapak Afrinaldi Eka Putra, S.Sos sebagai berikut:

Sejauh ini kita suda menampung dan mendegarkan apa yang menjadi keluhan pengguna pasar rengat terutama para pedangang hal ini bertujuan agar kami dapat bekerja dengan maksimal atas masukan yang dilontarkan sehingga adanya uapaya-upaya dalam penaggulan atas permasalahan dilapangan seperti penambahan penamupnagn sampah pengkutan sampah tepat waktu dan pemberitahuan pembuangan sampah pada tempatnya. Hal ini kami suda berupaya dalam melaksanakan apa yang menjadi masukan dari pengguna pasar. (Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Peningkatan Kapasitas bapak Afrinaldi Eka Putra, S.Sos, hari Senin pada tanggal 8 Februari Tahun 2021, Pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu sudah menampung dan mendegarkan apa yang menjadi keluhan pengguna pasar rengat terutama para pedangang hal ini bertujuan agar petugas pengakutan sampah dapat bekerja dengan maksimal atas masukan yang dilontarkan sehingga adanya uapaya-upaya dalam penaggulan atas permasalahan dilapangan seperti penambahan penamupnagn sampah pengkutan sampah tepat waktu dan pemberitahuan pembuangan sampah pada tempatnya.

Begitu juga hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pengelolaan Sampah Dan Pengangkutan Bapak Imron Hidayat, S.Sos sebagai berikut :

Sejauh ini dalam pengukutan sampah kami sudah menerima keluhan pengguna pasar terutama para pedagang hal ini bertujuan agar kegiatan penagkutan sampah dapat dimaksimalkan lagi sesuai dengan waktu ketetapan pengakutan sampah. Ya sejauh ini kita belum tepat waktu namun kedepannya kita tetap berusaha untuk lebih giat lagi sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. (Kepala Seksi Pengelolaan Sampah Dan Pengangkutan Bapak Imron Hidayat, S.Sos, hari Senin pada tanggal 8 Februari Tahun 2021, Pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu dalam pengkutan sampah kami sudah menerima keluhan pengguna pasar terutama para pedagang hal ini bertujuan agar kegiatan pengangkutan sampah dapat dimaksimalkan lagi sesuai dengan waktu ketetapan pengangkutan sampah.

Begitu juga pendapat petugas pengangkutan sampah di pasar rengat bapak Rinaldi sebagai berikut:

Dalam kegiatan pengkutan sampah kami sudah melakukan sesuai dengan jadwal pengkutan dan sejauh ini kegiatan pengangkutan sampah sudah didasarkan keluhan pengguna pasar dengan keluhan waktu pengangkutan sampah, jumlah penampungan sampah yang perlu ditambah, ya sejauh ini sudah dilakukan meskipun masih adanya permasalahan di lapangan namun petugas pengangkutan sampah selalu berupaya dalam pengkutan dengan tepat waktu. (petugas pengangkutan sampah di pasar rengat bapak Rinaldi, hari Selasa pada tanggal 9 Februari Tahun 2021, Pukul 15.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa kegiatan pengkutan sampah petugas sudah melakukan pengangkutan sampah sesuai dengan jadwal pengkutan dan sejauh ini kegiatan pengangkutan sampah sudah didasarkan keluhan pengguna pasar.

Begitu juga pendapat supir angkutan sampah di pasar rengat bapak Haris sebagai berikut:

Sejauh ini kami sudah berusaha dalam memaksimalkan pengkutan sampah namun tidak terkejar sampah setiap harinya diangkut di pasar rengat karena harus mengangkut sampah di lokasi lainnya. (supir angkutan sampah di pasar rengat bapak Haris, hari Selasa pada tanggal 9 Februari Tahun 2021, Pukul 13.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan sopir angkutan sampah sudah berusaha dalam memaksimalkan pengkutan sampah namun tidak terkejar

sampah setiap harinya diangkut di pasar rengat karena harus mengkutan sampah di lokasih lainnya.

Begitu juga hasil wawancara dengan Pedagang Pasar rengat Bapak Anwar sebagai berikut:

Sejauh ini keluhan kami belum direspon oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu dimana keluhan kami perlunya penambahan tempat penampungan sampah dan pengkutan sampah tepat waktu, namun hal ini belum adanya upaya yang dilkaukan sehingga sampah masih bertumpuak dan lambat untuk diangkut. (Pedagang Pasar rengat Bapak Anwar, Rabu pada tanggal 10 Februari Tahun 2021, Pukul 11.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa keluhan pedagang belum direspon oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu dimana keluhan pedagang perlunya penambahan tempat penampungan sampah dan pengkutan sampah tepat waktu, namun hal ini belum adanya upaya yang dilkaukan sehingga sampah masih bertumpuak dan lambat untuk diangkut.

Begitu juga hasil wawancara dengan Pedagang Pasar rengat Ibu Sri Hartati sebagai berikut:

Belum adanya perubahan atas keluhan para pedagang terutama terkait waktu pengkutan sampah sehingga sampah tidak bertumpuk dan berserakan seharusnya ketetapan aturan pengakutan sampah di setiap hari kerja melainkan dilakukan sampai 2 hari pengakutan sampah sehingga sampah bertumpuk dan mengeluarkan bau yang tidak sedap. (Pedagang Pasar rengat Ibu Sri Hartati, Rabu pada tanggal 10 Februari Tahun 2021, Pukul 12.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa Belum adanya perubahan atas keluhan para pedagang terutama terkait waktu pengkutan sampah sehingga sampah tidak bertumpuk dan berserakan seharusnya ketetapan aturan pengakutan sampah di setiap hari kerja melainkan dilakukan sampai 2 hari pengakutan sampah.

Hasil observasi penelitian bahwa respon atas keluhan pengguna pasar terutama pedagang dalam penagkutan sampah belum direspon oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu mulai dari penambahan penampungan sampah hingga waktu penagngkutan sampah yang seharusnya dilakukan disetiap hari kerja.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi diketahui bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu belum merespon apa yang menjadi keluhan pwngguna pasar hal ini terlihat bahwa penggkutan sampah pasar belum dilakukan disetiap harinya dan penambahan penampungan sampah belum disediakan sehingga pengguna pasar terutama pedangan merasa tidak nyaman atas sampah yang bertumpuk dan berserakan.

6. Ketepatan

Ketetapan, adalah apakah hasil tujuan yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai. Penangan sampah di pasar rengat dilakukan melalui pengkutan samah sesuai dengan aturan yang ditetapkan bahwa penagkutan sampah dilakukan disetiap hari jam kerja dengan penagkutan sampah di setiap penampungan sampah yang tersedia.

- **Penanganan Sampah Tepat Sasaran Sesuai Dengan Aturan Yang Ditetapkan**

Penanganan sampah tepat sasaran sesuai dengan aturan yang ditetapkan adalah bentuk ketetapan penagkutan sampah di pasar rengat sesuai dengan jadwal dan aturan yang akan dilakukan dengan tujuan agar sampah yang ada dipasar rengat dapat diangkut dan tidak menunggu penumpukan yang berlebihan.

Adapun berikut wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Peningkatan Kapasitas bapak Afrinaldi Eka Putra, S.Sos sebagai berikut:

Sejauh ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu dalam penagkutan sampah sesuai dengan ketetapan aturan yang berlaku bahwa waktu pengangkutan sampah dilakukan disetiap hari kerja sehingga sampah tidak bertumpuk yang berlebihan. (Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Peningkatan Kapasitas bapak Afrinaldi Eka Putra, S.Sos, hari Senin pada tanggal 8 Februari Tahun 2021, Pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu dalam penagkutan sampah sesuai dengan ketetapan aturan yang berlaku bahwa waktu pengangkutan sampah dilakukan disetiap hari kerja sehingga sampah tidak bertumpuk yang berlebihan.

Begitu juga hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pengelolaan Sampah Dan Pengangkutan Bapak Imron Hidayat, S.Sos sebagai berikut :

Sejauh ini dalam pengkutan sampah kami sudah melakukan berdasarkan aturan yang ditetapkan yaitu pengangkutan sampah disetiap hari kerja dengan tujuan agar sampah tidak bertumpuk yang berlebihan. (Kepala Seksi Pengelolaan Sampah Dan Pengangkutan Bapak Imron Hidayat, S.Sos, hari Senin pada tanggal 8 Februari Tahun 2021, Pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu sejauh ini dalam pengkutan sampah sudah melakukan berdasarkan aturan yang ditetapkan yaitu pengangkutan sampah disetiap hari kerja dengan tujuan agar sampah tidak bertumpuk yang berlebihan.

Begitu juga pendapat petugas pengangkutan sampah di pasar rengat bapak Haris sebagai berikut:

Pengkutan sampah yang kami lakukan ditetapkan setiap harinya sesuai dengan aturan jadwal yang ditetapkan namun dilapangan kami akui belum berlangsung sesuai dengan jadwal yang ditetantu disetiap harinya

namun terkadang kami lakukan dalam pengangkutan sampah sampai dengan 2 hari sehingga sampah bertumpuk dan berserakan. (petugas pengangkutan sampah di pasar rengat bapak Haris, hari Selasa pada tanggal 9 Februari Tahun 2021, Pukul 15.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa Pengkutan sampah yang di lakukan ditetapkan setiap harinya sesuai dengan aturan jadwal yang ditetapkan namun dilapangan belum berlangsung sesuai dengan jadwal yang ditetantu disetiap harinya dalam pengangkutan sampah sampai dengan 2 hari sehingga sampah bertumpuk dan berserakan.

Begitu juga hasil wawancara dengan Pedagang Pasar rengat Bapak Anwar sebagai berikut:

Sejauh ini pengangkutan sampah belum dilakukan petugas sampah disetiap hari namun sampai dengan 2 hari malah lebih sehingga sampah bertmpuk dan berserakan. (Pedagang Pasar rengat Bapak Anwar, Rabu pada tanggal 10 Februari Tahun 2021, Pukul 11.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa pengangkutan sampah belum dilakukan petugas sampah disetiap hari namun sampai dengan 2 hari malah lebih sehingga sampah bertmpuk dan berserakan.

Begitu juga hasil wawancara dengan Pedagang Pasar rengat Ibu Sri Hartati sebagai berikut:

Belum adanya perubahan atas kegiatan pengkutan sampah yang dilakukan petugas sampah dimana ditetapkan setiap hari namun yang terjadi samapai dengan 2 hari malah lebih sampai 3 hari hal ini menyebabkan penumpukan pada bak sampah sehingga menimbulkan bau yang tak sedap dan sampah bertumpuk dan berserakan. (Pedagang Pasar rengat Ibu Sri Hartati, Rabu pada tanggal 10 Februari Tahun 2021, Pukul 12.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa belum adanya perubahan atas kegiatan pengkutan sampah yang dilakukan petugas sampah dimana ditetapkan setiap hari namun yang terjadi samapai dengan 2 hari malah

lebih sampai 3 hari hal ini menyebabkan penumpukan pada bak sampah sehingga menimbulkan bau yang tak sedap dan sampah bertumpuk dan berserakan.

Hasil observasi penelitian bahwa penagan sampah belum dialkaukan berdasarkan aturan yang ditetapkan bahwa pengakutan sampah dilakukan disetiap hari kerja melainkan samapai dengan 2 sampai 3 hari pengakutan sehingga hal ini menimbulkan samapah yang berserakan dan menumpuk.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi diketahui bahwa ketepatan penagan sampah yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu belum masimal dimana ketetapan penagkutan samapah dialakuakn di setiap hari kerja melainkan sampai dengan 2 dan 3 hari sehingga hal ini memberikan dampak bagi pengguna pasar seperti bau yang tidak sedap diakibatkan sampah yang bertumpuk dan berserakan.

C. Hambatan Evaluasi Tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Pengangkutan Sampah Di Pasar Kota Rengat

Adapun hambatan yang dapat penulis ketahui mengenai Evaluasi Tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Pengangkutan Sampah Di Pasar Kota Rengat berdasarkan indicator prnrlian sebagaimana berikut:

Adapun berikut wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Peningkatan Kapasitas bapak Afrinaldi Eka Putra, S.Sos sebagai berikut:

Sejauh ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu dalam penagkutan sampah belum maksimal dimana ketetapan pengangkutan sampah dilakukan disetiap hari namun dilapangan dilakukan di setiap 2 atau 3 hari hal ini dikarenakan kurangnya angkutan operasional pengangkutan sampah terutama khusus angkutan sampah pasar Kota Rengat, akan tetapi sampah tetap akan diangkut meskipun kadang terjadi penumpukan. (Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Peningkatan Kapasitas bapak Afrinaldi Eka Putra, S.Sos, hari Senin pada tanggal 8 Februari Tahun 2021, Pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu dalam penagkutan sampah belum dilakukan disetiap hari namun di setiap 2 atau 3 hari hal ini dikarenakan kurangnya angkutan operasional pengangkutan sampah terutama khusus angkutan sampah pasar Kota Rengat.

Begitu juga hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pengelolaan Sampah Dan Pengangkutan Bapak Imron Hidayat, S.Sos sebagai berikut :

Sejauh ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu belum menerapkan kerjasama antara pegawai dan petugas pengkutan sampah sehingga belum terlihat adanya upaya memaksimalkan upaya pengangkutan sampah mulai dari waktu pengkutan sampai dengan penampungan akhir sampah. (Kepala Seksi Pengelolaan Sampah Dan Pengangkutan Bapak Imron Hidayat, S.Sos, hari Senin pada tanggal 8 Februari Tahun 2021, Pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu belum menerapkan kerjasama antara pegawai dan petugas pengkutan sampah sehingga belum terlihat adanya

upaya memaksimalkan upaya pengangkutan sampah mulai dari waktu pengkutan sampai dengan penampungan akhir sampah.

Begitu juga pendapat petugas pengakutan sampah di pasar rengat bapak Rinaldi sebagai berikut:

Belum adanya sosialisasi dan himbauan secara rutin oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu terhadap pengguna pasar terutama pedagang guna melakukan penertiban pembuangan sampah pada tempat yang telah disediakan sehingga sampah tidak berserakan dilokasih berjualan. (petugas pengakutan sampah di pasar rengat bapak Rinaldi, hari Selasa pada tanggal 9 Februari Tahun 2021, Pukul 15.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa Belum adanya sosialisasi dan himbauan secara rutin oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu terhadap pengguna pasar terutama pedagang guna melakukan penertiban pembuangan sampah pada tempat yang telah disediakan sehingga sampah tidak berserakan dilokasih berjualan.

Begitu juga hasil wawancara dengan Pedagang Pasar rengat Bapak Anwar sebagai berikut:

Sejauh ini belum bertanya penyediaan bak sampah yang ditempatkan di Lingkungan pasar rengat sehingga banyak sampah yang masih berserakan dibuang tidak pada tempatnya. (Pedagang Pasar rengat Bapak Anwar, Rabu pada tanggal 10 Februari Tahun 2021, Pukul 11.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa belum bertanya penyediaan bak sampah yang ditempatkan di Lingkungan pasar rengat sehingga banyak sampah yang masih berserakan dibuang tidak pada tempatnya.

Begitu juga hasil wawancara dengan Pedagang Pasar rengat Ibu Sri Hartati sebagai berikut:

Sejauh ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu belum menyediakan armada khusus pengkutan sampah pasar rengat sesuai dengan kebutuhannya dimana diketahui armada sebanyak 1 yang beroperasi dalam pengakutan sampah di Kawasan kota Rengat dan sering rusak sehingga menghambat pencapaian pengkutan sampah dengan optimal. (Pedagang Pasar rengat Ibu Sri Hartati, Rabu pada tanggal 10 Februari Tahun 2021, Pukul 12.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu belum menyediakan armada khusus pengkutan sampah pasar rengat sesuai dengan kebutuhannya dimana diketahui armada sebanyak 1 yang beroperasi dalam pengakutan sampah di Kawasan kota Rengat dan sering rusak sehingga menghambat pencapaian pengkutan sampah dengan optimal.



BAB VI

P E N U T U P

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan analisis data penelitian tentang Evaluasi Tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Pengangkutan Sampah Di Pasar Kota Rengat dikatakan cukup baik hal ini terlihat dari indikator penelitian Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas, dan Ketepatan. Bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu dalam pengangkutan sampah sudah dilaksanakan namun belum maksimal hal ini masih banyak sampah di pasar rengat yang terkadang tidak diangkut tepat waktu di setiap harinya sehingga menyebabkan penumpukan sampah dan berserakan hal ini dikarenakan kurangnya angkutan khusus sampah dimana 2 unit angkutan sampah yang beroperasi dan terkadang 1 unit dikarenakan rusak di Kecamatan Rengat sehingga tidak maksimalnya kegiatan pengangkutan sampah sampai ke pasar rengat.
2. Sementara hambatan dalam Evaluasi Tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Pengangkutan Sampah Di Pasar Kota Rengat Diketahui belum diterapkan berdasarkan jadwal aturan waktu pengangkutan sampah dilakukan disetiap hari kerja melainkan sampai dengan 2 dan 3 hari sehingga sampah bertumpuk dan berserakan, belum adanya sosialisasi dan himbauan secara rutin terhadap pengguna pasar terutama pedagang guna melakukan penertiban pembuangan sampah pada tempat yang telah disediakan. Dinas kebersihan belum menerapkan kerjasama antara pegawai dan petugas pengangkutan sampah sehingga belum terlihat adanya upaya memaksimalkan upaya pengangkutan sampah mulai dari waktu pengangkutan

sampai dengan penampungan akhir sampah, belum bertanya penyediaan bak sampah yang ditempatkan di Lingkungan pasar rengat sehingga banyak sampah yang masih berserakan dibuang tidak pada tempatnya dan penyediaan armada pengkutan sampah sesuai dengan kebutuhannya dimana diketahui armada sebanyak 1 yang beroperasi dan sering rusak sehingga menghambat pencapaian pengkutan sampah dengan optimal.

B. Saran

1. Hendaknya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu dalam Dalam pengkutan sampah menambah jumlah petugas sampah.
2. Perlunya kerjasama antara erat antara Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu dengan petugas pengangkutan sampah dilapangan agar pengangkutan sampah dapat dilaksanakan dengan maksimal.
3. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu hendaknya melakukan pengawasan secara rutin di lokasi pasar agar sampah tidak dibuang sembarangan di lingkungan pasar.
4. Hendaknya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu, menyediakan Armada pengangkutan sampah guna memaksimalkan kegiatan pengkutan sampah dimana diketahui beroperasi sebanyak 1 armada perlu ditingkatkan sebanyak 2 armada.
5. Hendaknya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu memberikan sanksi bagi pengguna pasar terutama pedagang yang melakukan pembuangan sampah dengan sembarangan tidak pada tempatnya.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-Buku

Abidin, Said Zainal. 2002. *Kebijakan Publik Edisi Revisi*. Jakarta: Yayasan Pancur Siwan.

- Admosudirjo, Prajudi. 2011. *Teori Kewenangan*. PT. Rineka Cipta Jakarta.
- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Pengelolaan Pendapatan Dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Depdikbud. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dunn, William, N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gajah Mada University Komputindo.
- Dwidjowijoto, Riant Nugroho. 2008. *Analisis Kebijakan*. Jakarta. Elex Media Komputindo.
- Handoko, Hani. T. 2003. *Manajemen Edisi II Cetakan ke-18*. Yogyakarta: BPFE.
- Harsoyo, 1977, *Manajemen Kinerja*, Persada, Jakarta.
- Kuncoro, Sejati, 2009. *Pengelolaan Sampah Terpadu: Dengan Sistem Node Sub Point Center Point*. Yogyakarta: Kanisius.
- Labolo, Muhadam, 2007. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Lubis, Solly. 2007. *Kebijakan Publik Mandar Maju*: Bandung.
- Manullang. 2006. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Marista, Liana. 2008. *Struktur Organisasi*. Yayasan Obor. Jakarta.
- Munaf, Yusri. 2015. *Hukum administrasi Negara*. Pekanbaru, Marpoyan Tujuh.
- Musanef, 1982, *Sistem Pemerintahan di Indonesia*. Jakarta: Gunung Agung.
- Muammar, Himawan. 2004. *Pokok-Pokok Organisasi Modern*. Bina Ilmu. Jakarta.
- Moleong J. Lexy. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ndraha, Talizidhu. 2003. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan baru) 1*. Jakarta: Raneke Jaya.

- Nugroho, Riant. 2006. *Publik Policy: Teori Kebijakan-Analisis Kebijakan-Proses*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Nurcholis, Hanif. 2005. *Teori dan Praktik: Pemerintahan dan otonomi Daerah*. Jakarta: PT Garasindo.
- Panglaykim, 1991. *Manajemen, Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Ghalia Indonesia.
- Robbins. P.S. 2002, *Prinsip-Perinsip Prilaku Organisasi edisi Kelima*. Jakarta: Erlangga.
- Rasyid, M. Ryass. 1997. *Kajian Awal Birokrasi Pemerintahan Dan Politik Orde Baru*. Jakarta: Yarsif Watampone.
- Siagian. 2003. *Pengawasan dan pengendalian di Bidang Pemerintahan*. Jakarta: UI Press.
- Sugiono, 2003. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung, Alfabeta
- Subarsono. A.G.2009. *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sutarto, 2003, *Dasar-Dasar Organisasi*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Soewarno Handyaningrat. 2011. *Konsep Tugas dan Fungsi*, Gunung Agung, Jakarta.
- Syafiie, inu Kencana. 2011. *Manajemen Pemerintahan*. Bandung: Rineka Cipta.
- Syafiie, Inu Kencana. 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Rafika Aditama.
- Tangkilisan, Hessel, Nogi S. 2003. *Kebijakan Publik yang Membumi*. Yogyakarta: Yayasan Pembaruan Dministrasi Publik Indonesia (YPAPI) & Lukman Offset.
- Wasistiono, Sadu, Dkk. 2009. *Perkenbangan Organisasi Kecamatan Dari Masa ke Masa*. Bandung: Fokus Media.
- Winarno. 2012. *Evaluasi Secara Sistematis*. Jakarta: PT. RajaGrapindo.
- Zulkifli, dkk. 2013. *Buku Pedoman Penulisan*. Pekanbaru: Badan Penerbit Fisipol UIR.